

## ***II. Isi Perencanaan Proyek***

## 1. Sejarah dan Latar Belakang Proyek

### 1.1. Karakteristik Desa di Indonesia.

#### (1) Proses modernisasi masyarakat tradisional pedesaan di Indonesia.

Dasar masyarakat pedesaan tradisional Indonesia dikatakan sebagai Gotong Royong (sistem saling membantu) dan semangat kekeluargaan. Masyarakat pedesaan tradisional semacam ini mengikut sertakan kedalam masyarakat kerjasama daerah selama modernisasi pertanian yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Kita akan melihat proses ini menguji karakteristik masyarakat Indonesia. Perubahan pengujian di masyarakat pedesaan melalui sejarah kerjasama pertanian. Hal ini didasarkan kepada thesis doctoral, "Research on the Development Process of Agricultural Cooperative Responding to Modernization in the Monsoon Asian Region" (= Riset Proses Pembangunan Kerjasama Pertanian Menanggapi Modernisasi di Musim Kawasan Asia), yang disampaikan kepada Bagian Riset Ilmu Pengetahuan Murni Universitas Okayama oleh Mr. S. Iwatono.

#### a) Pembangunan gerakan perkumpulan koperasi dan modernisasi masyarakat pedesaan.

Gerakan perkumpulan koperasi di Indonesia dapat dilacak kembali ke akhir abad ke-19, ketika negara ini dijajah oleh Belanda. Kemudian model perkumpulan koperasi Belanda, gerakan dikembangkan menjadi bank kredit tani melayani kelas menengah. Belakangan pada permulaan abad ke-20 kegiatan perkumpulan koperasi koperasi dagang Islam dan Belanda tukar menukar mahasiswa didalam Perkumpulan Mahasiswa Indonesia dikembangkan sejajar dengan gerakan kemerdekaan. Perkumpulan Mahasiswa Indonesia belakangan tumbuh menjadi Partai Nasional Indonesia, yang menjadi inti gerakan kemerdekaan. Dibawah pemerintahan Jepang perkumpulan koperasi digunakan oleh pemerintah militer untuk menciptakan politik pendudukannya, menjadi alat strategi untuk mempertahankan ekonomi peperangan. Hal ini telah menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap perkumpulan koperasi.

Setelah merdeka perkumpulan koperasi telah bertahan menjadi perwujudan semangat tradisional Indonesia Gotong Royong dan Semangat Kekeluargaan dan mulai membangun arah yang baru. Gerakan perkumpulan koperasi menjadi benar-benar aktif setelah tahun 1951, dengan peningkatan yang drastis dalam beberapa perkumpulan dan anggotanya dan besarnya neraca tabungan. Pada akhir 1950an campur tangan pemerintah diintensifkan dan perkumpulan koperasi dibentuk menjadi beberapa organisasi untuk membagi bahan makanan pokok. Mereka menerima keuntungan yang lumayan dari keadaan ini dan banyak perkumpulan baru tumbuh untuk berlomba bagi mereka. Pada tahun 1965 beberapa perkumpulan telah tumbuh menjadi lebih dari 70,000. Namun perkumpulan koperasi pada saat itu menjadi cabang yang lebih rendah di organisasi

pemerintah untuk pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah untuk menjadi dipengaruhi dengan kuat oleh ideologi komunis pada waktu itu.

Dengan terjadinya pengambilan paksa kekuasaan Partai Komunis pada tahun 1965 dan berdirinya pemerintahan baru perkumpulan koperasi diperkenalkan dan kembali ke prinsip yang asli. Sejumlah perkumpulan telah menyusut dari lebih dari 70,000 pada tahun 1965 menjadi kurang dari 9,000 di tahun 1968, tetapi yang tahan terus berkembang, sebagai perkumpulan koperasi yang benar dan menjadi dewasa.

Pada tahun 1973 perkumpulan koperasi ini berubah sebagai Badan Usaha Unit Desa - BUUD dan Koperasi Unit Desa - KUD, yang dalam bentuk ini mereka bertahan sampai sekarang.

Kejadian yang bersejarah, gerakan perkumpulan koperasi di Indonesia dan koperasi pertanian khususnya, telah digunakan sebagai alat politik melalui perkembangannya, dibandingkan dengan kebutuhan perkumpulan itu sendiri. Akibatnya ketidakpercayaan diantara petani meluas. Pada tahun 1967 - 1968 jumlahnya menurun tajam dan mereka mulai bekerja lagi dalam bentuk baru. Hasilnya terbentuk Badan Usaha Unit Desa dan Koperasi Unit Desa yang menggantikan koperasi pertanian yang lama. Khususnya mereka mengembangkan dalam skala mereka didalam batas administrasi untuk mencapai rasionalisasi administrasi, dan mengorganisasi sebagai usaha daerah pedesaan untuk mengurangi biaya, sehingga mereka dapat memegang peranan dalam gerakan perkumpulan koperasi di daerah pedesaan.

Pada kenyataannya dinamakan perkumpulan koperasi desa bukan perkumpulan koperasi pertanian yang menandakan perubahan gerakan perkumpulan koperasi Indonesia yang alami dalam bentuk yang baru.

### b) Rencana Bimas dan perubahan perkumpulan koperasi

Pemerintah Indonesia menggunakan Rencana Bimas sebagai alat (Bimbingan Massa untuk swa sembada bahan makanan) sebagai kebijaksanaan modernisasi pertanian dan mendorongnya kedepan dengan penuh semangat. Rencana Bimas adalah rencana yang ditetapkan untuk memperbanyak sistem teknik yang baru, dikonsentrasikan ke sawah. Mengenalkan padi varietas dengan panen tinggi, menyediakan pengarah distribusi pupuk, pupuk kimia dan kredit. Rencana dimulai pada tahun 1963 dengan perkumpulan koperasi sebagai inti, tetapi pada pertama kali gagal mencapai hasil yang memadai. Hal ini mendorong Rencana Bimas Gorong Royong pada tahun 1968 dan Rencana Bimas yang disempurnakan tahun 1970 meningkatkan dan membetulkan Rencana Bimas yang asli. Koperasi pertanian yang lama yang pada mulanya sebagai inti perencanaan diganti baru yang diorganisir oleh Badan Usaha Unit Desa dan Unit Koperasi Desa. Organisasi

baru ini bukan perkumpulan koperasi sederhana untuk kegiatan dalam kehidupan pertanian, mereka bertindak untuk mempersatukan dan menciptakan semua tipe aktivitas di daerah pedesaan. Aktivitas kehidupan pertanian tetap sebagai peranan pusat, tetapi peranannya diperluas membuat perkumpulan koperasi meliputi banyak hal. Pergeseran alami masyarakat dari perkumpulan koperasi pertanian ke perkumpulan koperasi pedesaan telah disertai oleh pembangunan dan kemajuan pekerjaannya. Tabel 2-1 menunjukkan perubahan produksi beras di Indonesia pada waktu itu. Jelas, hasil panen per satuan luas telah meningkat dengan tajam sejak 1968.

Tabel 2-1 : Luas produksi, Hasil per Hektar dan Total Produksi di Indonesia

Tahun	Luas produksi (juta Ha)			Total produksi (beras step)			Hasil per hektar (ton)		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
1960	4.32	2.96	7.28			10.17			1.40
61	3.99	2.87	6.86			9.58			1.40
62	4.09	3.19	7.28			10.28			1.41
63	3.65	3.08	6.73			9.16			1.36
64	3.66	3.32	6.98			9.61			1.38
65	4.01	3.32	7.33			10.24			1.40
66	4.12	3.57	7.69			10.75			1.40
67	4.02	3.49	7.51			10.40			1.38
68	4.26	3.76	8.02	7.07	4.59	11.67	1.66	1.22	1.45
69	4.29	3.72	8.01	7.50	4.75	12.25	1.75	1.28	1.53
1970	4.30	3.83	8.14	7.89	5.25	13.14	1.83	1.37	1.62
71	4.41	3.91	8.32	8.44	5.29	13.72	1.91	1.35	1.65
72	4.34	3.65	7.98	8.11	5.08	13.18	1.87	1.42	1.67
73	4.56	3.82	8.38	8.87	5.74	14.61	1.94	1.49	1.74
74	4.73	3.78	8.51	9.44	5.84	15.28	2.00	1.54	1.80
75	4.65	3.84	8.50	9.33	5.86	15.18	2.01	1.52	1.79
76	4.47	3.90	8.37	9.56	6.28	15.34	2.14	1.61	1.89
77	4.38	3.98	8.36	9.33	6.54	15.88	2.13	1.64	1.90
78	4.75	4.18	8.93	10.61	6.92	17.52	2.23	1.66	1.96
79	4.63	4.16	8.80	10.68	7.19	17.87	2.31	1.72	2.03
1980	4.78	4.24	9.02	12.61	7.64	20.25	2.63	1.80	2.25
81	4.86	4.43	9.30	13.50	8.17	21.67	2.78	1.84	2.33

c) Perubahan masyarakat pedesaan dan pembangunan pedesaan karena adanya Rencana Bimas

Keberhasilan rencana Bimas dan pembangunan BUUD dan UKD ibaratnya dua sisi yang sama pada uang logam (coin). KUD mempunyai dampak menentukan pada sistem distribusi pupuk dan varietas dan mereka memegang monopoli dalam mengumpulkan dan mengapalkan panen beras. Penyelesaian sistem ini membawa stabilitas harga beras yang mengesankan. Dilain pihak kebijaksanaan pemerintah mendukung harga beras dan dukungan pemerintah dalam persatuan koperasi telah menelurkan ketidak efisienan pengelolaan koperasi dan dan berbagai masalah lain perlahan-lahan timbul kepermukaan. Hasilnya, seperti telah terlihat dari contoh dalam menangani beras sliip terlihat di Tabel 2-2, bagian pasar dipegang oleh BUUD elah merosot perlahan-lahan dari puncaknya terjadi tahun 1984. Pada tahap pertama pembangunan ekonomi perkumpulan koperasi

memainkan peranan penting dalam mempromosikan kebijaksanaan pemerintah pusat, tetapi sekali pada suatu tingkat pertumbuhan telah tercapai, peranan tadi berubah. Arah pekerjaan perkumpulan koperasi diperiksa dan dipertanyakan lagi dan aktivitas KUD dan BUUD kini memasuki tahap peralihan.

Tabel 2 - 2 : Perubahan penanganan volume beras slijp oleh KUD

Tahun	Beras slijp (1,000 ton)			Bagian KUD (%)
	KUD	Lain-lain	Total	
<b>Pelita II</b>				
1974/1975	352	181	533	66.0
1975/1976	372	167	539	69.0
1976/1977	225	186	411	54.7
1977/1978	212	205	417	50.8
1978/1979	292	589	881	33.1
Rata-rata	291	266	556	54.8
<b>Pelita III</b>				
1979/1980	320	111	431	74.2
1980/1981	1,516	119	1,635	92.7
1981/1982	1,969	45	2,041	97.8
1982/1983	1,834	211	2,045	89.7
1983/1984	2,036	173	1,209	85.7
Rata-rata	1,335	132	1,467	88.0
<b>Pelita IV</b>				
1984/1985	1,930	575	2,505	77.0
1985/1986	1,400	625	2,205	69.1
1986/1987	1,273	244	1,517	83.9
Rata-rata	1,534	481	2,016	76.7

Sumber : Badan Reset dan Pengembangan, Departemen Koperasi.

Pembangunan ekonomi dan modernisasi pertanian yang dipusatkan telah membuat kontribusi yang besar dalam pembangunan Indonesia disegala bidang. Saat ini beberapa tingkat modernisasi pertanian yang didasari oleh pembangunan ekonomi telah tercapai. Namun berbagai konflik, yang membawa penyimpangan, meluas dan muncul kepermukaan dengan datangnya modernisasi. Kondisi ini telah membawa penurunan gerakan perkumpulan koperasi dan aktivitasnya menjadi terhenti, seperti terlihat pada berkurangnya penanganan beras slijp. Sesuatu perubahan akan terjadi di pedesaan Indonesia, yang telah mencapai pembangunan ekonomi. Yang kita lihat sekarang adalah tahap mencari arah baru. Pada masa transisi menguji gerakan pembangunan pedesaan sangat penting, dipembangunan yang telah dimulai oleh gerakan rakyat tingkat bawah, adalah pertanyaan besar bagaimana Jepang mencari bentuk seharusnya pembangunan koperasi desa Inonesia yang telah mendukung pembangunan ekonominya.

Kesimpulannya modernisasi pertanian sawah di Indonesia telah mencapai swa sembada pangan dan modernisasi pertanian telah sangat bernilai sebagai inti pembangunan ekonomi. Pada waktu yang bersamaan modernisasi telah membawa peluang pembangunan yang penting kepada petani kelas atas pemilik tanah. Dilain pihak proses

telah melebarkan kesenjangan antara petani kelas atas dan petani yang tidak memiliki tanah yaitu buruh tani yang tertinggal dibelakang dipembangunan ini. Hasilnya ialah memperbesar ketidak stabilan di daerah pedesaan. Jepang yang maju mempunyai pengalaman dalam pembangunan melalui proyek pembangunan daerah seperti diterangkan diatas, gerakan pembangunan pedesaan, demikian disebutnya, proyek untuk pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai proyek yang bertujuan untuk mengentaskan induksi modernisasi dan menolong menstabilkan masyarakat pedesaan sebagai keseluruhan.

Mempelajari dari situasi yang sedang berjalan di Indonesia gerakan pembangunan pedesaan sedang mencapai tahap sangat penting dan pada tahap ini dukungan yang kuat Jepang kepada proyek pembangunan pedesaan dan proyek koperasi untuk pembangunan desa jelas sangat bernilai.

(2) Teknik pertanian tradisional dan tata guna tanah intensif di daerah hutan tropis

a) Keadaan saat ini dan kecenderungan tata guna tanah di Indonesia

Tabel 2-3 menunjukkan luas total tanah pertanian di Indonesia dan perincian penggunaannya. Tabel memberikan gambaran untuk tahun 1983 - '85 dan 1986 - '88 dan perubahan antara gambaran ini. Sebagaimana tabel memperlihatkan luas total pertanian kira-kira 28.6 juta hektar, dari antaranya yang terbesar untuk lahan kering sebesar 12.6 juta hektar. Luas ini termasuk luas terdahulu digarap dengan sistem golongan yang praktis adalah lahan yang tidak dimanfaatkan. Sisa sebesar 16 juta hektar separo adalah sawah, 5 juta hektar adalah pekarangan dan 3 juta hektar padang rumput. Sawah seluas 28% dari seluruh pertanian dan pekarangan 17%. Peran besar adalah pekarangan. Yang aneh adalah hutan tropik dan jarang terlihat dilain negara, perlu dicatat.

Tabel 2-3 Perubahan luas total pertanian di Indonesia dan perincian tata guna lahannya

Tahun		Pekarangan	Tanah kering	Sawah	Padang rumput	Luas seluruhnya
1983-1985	(Ha)	4,836,058	12,154,654	7,504,075	3,629,324	28,124,114
	(%)	17.19	43.12	26.88	12.90	100.00
1986-88	(Ha)	4,960,094	12,598,302	7,970,555	3,052,492	28,581,443
	(%)	17.35	44.07	27.88	10.67	100.00
1983-85	(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1986-1988	(%)	102.00	103.65	106.21	84.10	101.62

Sumber : Badan Reset dan Pengembangan, Departemen Koperasi.

Kecenderungan perubahan tata guna tanah luas total tanah pertanian meningkat dengan hampir 2% selama tiga tahun. Luas sawah naik lebih 6%, tanah kering dalam pembangunan. dengan hampir 4% dan pekarangan dengan 2%, sementara padang

rumpun turun dengan 16%. Kenaikan tajam dalam penggunaan untuk sawah, tanah yang digunakan intensif dan turun drastis di padang rumput, penggunaan tanah yang tidak intensif cenderung dominan. Meskipun sedikit kenaikan pekarangan juga tidak bernilai. Sebagai perbandingan kecenderungan daerah, Tabel 2-4 dan 2-5 menunjukkan hasil studi semacam di Propinsi Jawa, yang lebih berkembang dan Propinsi di Sulawesi yang tertinggal. Di Jawa luas pekarangan naik sekitar 5%, sementara sawah menurun. Sebaliknya di Sulawesi luas pekarangan menurun sampai 7% dan luas sawah naik dengan 6%. Hal ini menarik dicatat bahwa kecenderungan di pekarangan dan disawah di dua propinsi ini benar-benar bertolak belakang.

Di Jawa pembangunan sawah turun selangkah sementara di Sulawesi pembangunan sawah terlihat dipuncak sekarang ini. Dipuncak pembangunan pertanian sawah baru dibuat meskipun harus menggeser pekarangan. Sejalan kemajuan pembangunan terlihat sebaliknya luas pekarangan naik lagi. Tipe lahan pertanian dibangun berbeda dengan tingkat pebangunannya.

Tabel 2-4 : Perubahan Luas Total Tanah Pertanian di Propinsi Jawa dan Perincian Penggunaannya

Tahun	Pekarangan	Tanah kering	Sawah	Padang rumput	Luas seluruhnya
1983-85 (ha)	1,567,880	3,128,730	3,482,880	65,030	8,244,520
(%)	19.01	37.94	42.24	0.78	100.00
1986-88 (ha)	1,638,750	3,129,750	3,445,170	62,740	8,267,410
(%)	19.80	37.81	41.62	0.75	100.00
1983-85 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1986-88 (%)	104.52	100.03	98.91	96.47	100.38

Sumber : Badan Reset dan Pengembangan, Departemen Koperasi.

Tabel 2-5 : Perubahan Luas Total Tanah Pertanian di Propinsi Sulawesi dan Perincian Penggunaannya

Tahun	Pekarangan	Tanah kering	Sawah	Padang rumput	Luas seluruhnya
1983-85 (ha)	431,595	1,764,010	747,314	790	3,733,123
(%)	11.56	47.25	20.01	21.16	100.00
1986-88 (ha)	400,890	1,819,366	789,739	591,915	3,601,910
(%)	11.12	50.51	21.92	16.43	100.00
1983-85 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1986-88 (%)	92.88	103.13	105.67	74.90	96.48

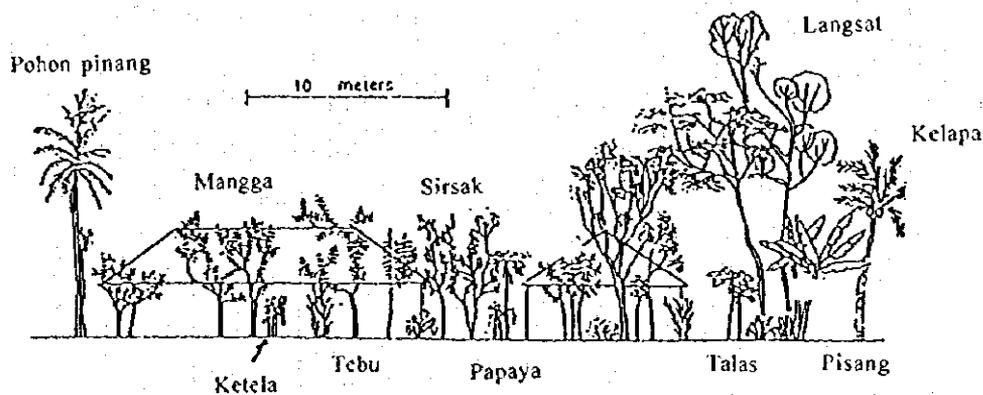
Sumber : Badan Reset dan Pengembangan, Departemen Koperasi.

Analisa tersebut diatas mendemonstrasikan bahwa pembangunan sawah memegang peranan sangat penting dalam tahapan pembangunan pertanian di seluruh daerah dan untuk negara sebagai keseluruhan. Pada waktu pembangunan sawah telah stabil sehubungan dengan pembangunan besar-besaran ditingkat kebijaksanaan nasional dan

hasil pendapat dari pembangunan ini juga telah distabilkan, terlihat dorongan kenaikan diantara para petani untuk membangun pekarangan yang akan dilaksanakan lebih dulu karena dekatnya dengan kehidupannyasehari-hari. Bila pembangunan sawah di propinsi Sulawesi diperlambat setingkat kebutuhan pekarangan dapat diperkirakan naik.

(b) **Pekarangan**

Pekarangan digunakan sangat intensif dalam tataguna tanah yang digunakan dua karakteristik hutan tropik, katakan tumbuh sangat kaya tetumbuhan dengan formasi ekosistem yang rumit. Dengan cara pertanian tradisional yang sudah sejak lama dipraktekkan didaerah ini. Dengan kombinasi pohon yang tinggi dan tumbuhan tahunan seperti varietas kentang, ekologi agro-kehutanan yang stabil telah terbentuk bersama-sama bermacam tanaman varietas dan tahan hama. Keuntungan lain pekarangan adalah membutuhkan pupuk sedikit saja atau pupuk kimia untuk pemeliharaan. Pada tahun terakhir ini cara bertani ini telah diteliti sebagai alat konservasi lingkungan karena tahan dan memerlukan sedikit masukan. Lahan seluas 10 hektar ditanami seperti cara ini dapat sebagai pekerjaan tambahan sepanjang tahun untuk satu keluarga. Dalam banyak hal juga sebagai penahan angin dan sumber penutup. Pekarangan juga membuat karakteristik pemandangan pertanian desa di daerah tropik. Gambar 2-1 memperlihatkan tipe aneka tanaman di pekarangan.



Asli: Christian Linda et, al "Agro-hutan tradisional di Jawa Barat: Pekarangan dan sistem kebun tanaman tahunan (Tanaman tahunan bergilir)":  
 Marten Gerald G. Tumbuh tumbuhan Tradisional di Asia Tenggara, Westview Press, 1984, PP 132-156.

Gambar 2-1 Tipe aneka tanaman di pekarangan.

**(3) Proyek pembangunan desa sebagai tambahan kebijaksanaan modernisasi pertanian**

**a) Proyek pembangunan persawahan dalam kebijaksanaan modernisasi pertanian**

Kebijaksanaan modernisasi pertanian Indonesia dalam bentuk Rencana Bimas dan penggantinya yang telah direvisi, telah mencapai keberhasilan yang lumayan. Rencana Bimas yang difokuskan pada pengenalan bibit varietas unggul, khususnya di sawah, telah mencapai swa sembara pasokan makanan pokok dan telah meletakkan pondasi untuk menumbuhkan ekonomi di negara ini sebagai keseluruhan. Daerah pedesaan telah terlihat banyak kemajuan sebagai cara untuk memperoleh pendapatan menjadi terbuka.

Sejak pertengahan 1980-an kebijaksanaan modernisasi pertanian dipusatkan di persawahan untuk mencapai titik transisi utama. Telah kita ketahui kondisi pada waktu itu melalui contoh gerakan perkumpulan koperasi.

Pembangunan persawahan dilakukan pada lahan padang rumput atau lahan yang sebelumnya lahan sistem golongan yang memenuhi syarat untuk padi. Dibawah perencanaan Bimas sawah pertanian telah meningkat secara intensif dan membawa kenaikan hasil yang sangat mengesankan per satuan luas pada 1970 an, sampai sawah menghasilkan produksi yang besar dan surplus. Pengembangan BUUD dan KUD tidak dapat dipisahkan dari Rencana Bimas dan kombinasi keduanya membawa peningkatan yang tinggi dalam pendapatan, terutama para petani pemilik tanah kelas atas. Di Indonesia bila pembangunan dan peningkatan sawah bersamaan datangnya dengan gerakan persatuan koperasi, modern, hasilnya kemajuan sawah intensif. Satu hal yang penting yang perlu dicatat adalah rakyat yang memperoleh manfaat yang besar dari kebijaksanaan modernisasi yaitu mereka petani kelas tinggi yang memiliki lahan yang luas.

**b) Pembangunan koperasi desa dan dukungan untuk pembangunan mandiri dan peningkatan pertanian**

Propinsi di Jawa adalah yang pertama kali memiliki persawahan berdasarkan modernisasi pertanian, hal ini terlihat dari adanya kenaikan tajam sejak pertengahan 1980 di pengembangan lahan pekarangan yang dilakukan secara mandiri oleh petani. Di lahan persawahan malahan condong menurun. Kecenderungan ini rupanya karena petani yang mengelola telah menumpuk kekayaan melalui pertanian intensif persawahan, mulai menginginkan pekarangan tradisional memasok pangan untuk konsumsinya. Hal ini menandakan keinginan yang sangat kuat diantara petani secara umum memiliki pekarangan yang sangat-sangat intensif dalam pertanian, terutama penyediaan

kebutuhan keluarga. Oleh hal tersebut ada kecenderungan kuat semua petani memiliki tanah pekarangan, dibanding beberapa petani yang memiliki tanah yang luas.

Peningkatan lahan pekarangan kebanyakan disebabkan oleh pengembangan secara mandiri oleh petani jadi hal ini ada perbedaan karakter pembangunan dari pembangunan skala besar persawahan. Perkembangan lahan pertanian di Indonesia adalah polarisasi antara pergeseran terhadap modern yaitu intensifikasi pertanian melalui persawahan dan pergeseran terhadap intensifikasi tradisional melalui pekarangan. Intensifikasi pertanian sebelumnya melalui persawahan berdasarkan prinsip rasionalisasi ekonomi. Terakhir intensifikasi tradisional melalui pekarangan, mempunyai kepentingan sosiologi dari itu menjadikan stabilitas masyarakat pedesaan dan tradisi turun temurun. Sebelumnya berdasarkan pembangunan lahan skala besar dan teknik pertanian modern sedangkan berikutnya berdasarkan pembangunan pedesaan sebagai gerakan rakyat lapisan bawah.

Daerah yang termasuk maju propinsi di Jawa telah mencapai batas kemajuan persawahan dan perkembangan pekarangan mulai didatangi, tetapi propinsi di Sulawesi yang tertinggal dibelakang sekarang ditahap pembangunan persawahan. Situasi ini jelas dari kecenderungan tata guna tanah tersebut diatas. Dimasa datang relatif pekarangan akan penting di Sulawesi dan dapat diperkirakan akan naik. Oleh karena itu Sulawesi pembangunan persawahan dengan skala besar yang sedang berlangsung harus dibarengi oleh pola pembangunan lain pembangunan persawahan skala kecil dengan pembangunan pekarangan di daerah, tinggalkan pembangunan skala besar. Pola ini harus di promosikan sebagai gerakan rakyat tingkat bawah untuk proyek pembangunan pedesaan yang akan memproduksi lebih efektif pembangunan pedesaan. Pembangunan proyek desa koperasi harus bukan berupa proyek pembangunan persawahan. Sebagai alih-alih mereka harus mengorganisir proyek mandiri milik petani sendiri, kedua-duanya yaitu membangun persawahan skala kecil dan pekarangan untuk mengimbangi pembangunan persawahan yang lebih besar. Bantuan harus difokuskan kepada dukungan terhadap usaha semacam itu.

e) Kebutuhan tata guna tanah intensif di daerah hutan tropis dan Peningkatan lahan

Pertanian tradisional pekarangan dikhususkan ke reset pengetahuan modern, "*Modern Agro Forestry*" (Agro-hutan modern) didirikan sebagai sistem baru teknik pertanian. Asal Agro-hutan dalam bentuk pertanian yang diadopsi dengan baik dengan kombinasi tanaman tumbuh yang ditinggalkan. Kering dan intensitas hujan yang tinggi adalah ciri daerah tropis. Khususnya di daerah dengan dasar tanah berabu vulkanik kelompok tanaman dikombinasikan pohon buah-buahan dengan grup akar tersebar kedalam dan tanaman tahunan dengan akar dangkal vertikal ketanah yang rakus dalam mendapatkan air bergerak. Hasilnya sejumlah besar air hujan yang terbuang ditampung ditanah dan disiramkan untuk digunakan secara efektif dalam pertumbuhan tanaman. Cara ini juga

terdapat di "water harvesting" (panenan air) metoda yang secara pertanian tradisional di Timur Tengah. Hal ini dapat diberikan sebagai sistem optimum teknik pertanian dan metoda tata guna tanah untuk lingkungan alam di Kepulauan Asia Tenggara yang tertutupi oleh debu vulkanis dan mempunyai hujan berlimpah.

Pekarangan yang didandani dengan baik menjadi menyatu dengan lingkungan alam, membuat bermanfaat secara maximum sumber yang ada, tahan terhadap hama dan memerlukan pupuk sedikit saja, memakan tempat sedikit dilingkungannya sementara membuat pendaya gunaan lahan secara intensif. Hal ini harus ditempatkan sebagai cara ketiga sebagai pengguna tanah secara intensif, sepanjang pinggir sawah dan lahan kering yang beririgasi. Pekarangan harus dievaluasi ulang dari perspektif ini.

### d) Pembangunan desa koperasi diluar negeri dan konservasi lingkungan

Gerakan pembangunan desa adalah gerakan rakyat tingkat bawah dan dibanyak kasus perkembangannya didasarkan kepada teknik pertanian tradisional yang telah dengan baik diadaptasi didaerah. Metoda pertanian tradisional ini telah diadaptasikan ke kondisi lingkungan disekitarnya dan menggunakan sedikit beban di lingkungannya. Perkembangannya dapat pula diselesaikan secara relatif dengan investasi kecil. Oleh karena itu kerja sama dengan semacam gerakan untuk pembangunan desa, dikatakan dengan berlebihan akan membuat sedikit kontribusi kepada konservasi lingkungan.

Pada banyak hal pekarangan diadakan di lahan yang sebelumnya penanaman bergilir. Bila lahan rusak oleh penanaman golongan dapat dirhabilitasi dengan cepat dan dibangun untuk pertanian yang intensif, hasilnya akan menurunkan perluasan pertanian. Pada gilirannya akan menurunkan beban lingkungan yang besar pada penanaman golongan.

Pertanian berpindah sering dipraktekkan oleh petani kelas bawah yang tidak memiliki sendiri sawah dan buruh yang tidak memiliki tanah pertanian. Dengan mengkombinasikan pembangunan pekarangan dan sawah, mereka akan dapat menjadi stabil, pertanian intensif, mampu melakukan kontribusi penting dalam stabilitas masyarakat pedesaan. Mengubah secara modern semacam pertanian intensif tradisional yang terlihat di pekarangan dan membawanya kembali ke keunggulannya, akan menghasilkan keuntungan besar pada konservasi lingkungan alami daerah tropis.

### 1.2. Survey dasar kedalam pembangunan desa seberang oleh JALDA

Rencana Pembangunan Lima Tahun ke 5 (Repelita) Pemerintah Indonesia menetapkan sasarannya untuk mencapainya melalui pembangunan pertanian, sebagai berikut:

- i) Mempertahankan swa sembada pangan.
- ii) Meningkatkan produksi dan kualitas produksi pertanian
- iii) Meningkatkan pendapatan rakyat daerah pedesaan
- iv) Memperbaiki tingkat hidup petani.
- v) Memperluas kesempatan kerja
- vi) Memajukan kebijaksanaan migrasi
- vii) Keseimbangan pembangunan daerah

Kebijaksanaan ini ditargetkan daerah diluar Jawa khususnya daerah bagian Timur.

Memajukan pertanian dan memajukan daerah pedesaan dinegara sedang berkembang dilanjutkan untuk menekan masalah penderitaan seperti rendahnya produktivitas, kondisi kehidupan yang buruk, meluasnya kemiskinan dan rusaknya lingkungan disekitarnya. Bantuan dimasa depan akan harus jauh lebih efektif.

Untuk mengakhiri Departemen Luar Negeri dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merencanakan kerja sama teknik yang berorientasi proyek dengan sifat dengan daftar berikut sebagai arah baru untuk bantuan rencana pertanian dan rencana pembangunan pedesaan di negara sedang berkembang.

- 1) Kebijakann meningkatkan prasarana fisik di daerah pedesaan akan dilaksanakan bersama dengan tujuan kebijaksanaan rencana pengembangan menyeluruh rencana teknik prasarana.
- 2) Rencana didorong kedepan oleh partisipasi daerah dalam bentuk inisiatif perwakilan daerah dan yang berhubungani dengan pemerintah daerah yang terkait.
- 3) Perbaikan prasarana akan dilakukan dengan menggunakan tenaga dan bahan lokal.
- 4) Organisasi pertanian juga akan diperkuat.

Metoda diatas akan dialihkan kesemua tenaga lokal agar terampil sesuai bidangnya, wakil petani dan yang lain disertakan dalam pertanian yang menyeluruh dan pembangunan pedesaan semua tenaga lokal(pembangunan desa) dan memperbesar pengaruh suara yang menguntungkan daerah sekitarnya.

Propinsi Sulawesi Tenggara, yang menjadi subjek perencanaan terletak di Tenggara pulau Sulawesi yang terletak di Indonesia Timur. Dipisahkan dari Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1964, membuat propinsi termuda dari empat propinsi di Sulawesi dan propinsi ketiga termuda di Indonesia. Itulah mengapa pembangunan di propinsi ini tertinggal dibelakang dari propinsi yang lain. Sejumlah 91% penduduknya hidup di daerah pedesaan dan pertanian adalah salah satu

propinsi paling penting dalam industri. Meskipun kenyataan bahwa sekitar 30% lahan daerah propinsi mempunyai potensi yang kuat untuk dibangun menjadi tanah pertanian (khususnya untuk lahan kering, peternakan dan tanaman perkebunan) masih tertinggal sebagai "sleeping land" (lahan tidur) yang berhak mendapat rencana pembangunan segera.

Pertanian di Sulawesi Tenggara lama terdiri dari pertanian berpindah, lahan kering dan pohon buah-buahan. Makanan pokok penduduk adalah sagu dan ketela pohon. Pembangunan sawah dan irigasi telah dimulai didaerah ini oleh pendatang, tetapi irigasi dengan skala kecil dan fasilitasnya diuat oleh para petani sendiri dengan cara tradisional.

Sementara iklim di daerah tersebut baik sekali untuk pengolahan berbagai tanaman, produktivitas pertanian yang baik dibawah Indonesia secara keseluruhan. Hasil panen padi rendah dibawah 2.4 ton/Ha.

Renahnya produktivitas disebabkan oleh terminal fasilitas yang buruk dan fasilitas penanganan pasca panen. Khususnya tingkat prasarana dasar pertanian (pintu pengambilan, irigasi dan saluran drainasi, jalan pertanian dan sebagainya) rendah dan teknik yang digunakan untuk pengolahan padi (pertanian, pengolahan, pengelolaan air dan sebagainya) tidak secara teratur dibangun menjadi bentuk alami dan kondisi kultur daerah. Pelatihan teknis kunci dan pelaksanaan fasilitas pertanian merupakan tugas penting untuk pembangunan menyeluruh pertanian di daerah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah bekerja membangun prasarana terminal untuk melatih dan menatar pekerja pemerintah agar berkualitas, memperluas daerah lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini juga ditujukan untuk membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan atau dengan lain kata menaikkan tingkat pendapatan dan standar kehidupan di daerah dengan meningkatkan pasar dan fasilitas distribusi.

Untuk mengatasi masalah ini Departemen Pertanian Indonesia (Deptan) dan tim survey dari Japan Agricultural Land Development Agency (JALDA) mengirim dengan bantuan dari Departemen Pertanian Jepang, Kehutanan dan Perikanan, melakukan survey dasar bersama. Survey tersebut bertujuan menyediakan informasi dasar untuk meliputi pertanian dan rencana pembangunan pedesaan pada Maret 1990, dan mengumpulkan dokumen informasi teknik konstruksi dan sebagainya yang diperlukan untuk pekerjaan koperasi yang baik didaerah. (Survey dilakukan pada bulan Agustus – Oktober 1989 dan December 1989 – Maret 1990).

Tabel 2-6 : Tim Survey Dasar untuk Meningkatkan Desa Kabupaten di Luar Negeri

(Agt-Okt 1989; Dec 1989-Maret 1990)

Penugasan	Nama Anggota	Tim Survey	Isi Survey
Pembangunan Daerah	Koji Hattori	1989/8/7 – 8/12	Survey dasar untuk perbaikan kabupaten pedesaan asing.
Rencana Pertanian	Yoshiya Takashima	1989/8/7 – 10/31	ditto
Irigasi dan Drainasi	Tatsuo Matsunaka	1990/1/10 – 2/9	ditto
Pembangunan Daerah	Nobuyoshi Kayano	1989/12/23 – 90/3/25	Survey dasar untuk pembangunan pertanian dan pedesaan terpadu
Ekonomi Pertanian	Shunsuke Akamatsu	1990/1/10 – 2/9	ditto
Pembangunan Ternak	Takashi Higashimaki	1990/1/10 – 3/10	ditto
Rencana Pertanian	Yoshiya Takashima	1990/2/20 – 3/10	ditto

Di negara maju pada tahun terakhir ini, kemiskinan dan ketinggalan pembangunan di daerah pedesaan telah dipicu dengan adanya migrasi rakyat petani ke kota-kota, yaitu meninggalkan tanah pertanian untuk terjun ke keadaan tak terpakai, jatuh dan lebih jauh menimbulkan kematian sosial dan masalah lingkungan di daerah pertanian. Usaha besar yang penting adalah untuk mengisi pembangunan dan memperhatikan kembali daerah pedesaan agar memaku rakyat ke lahannya dan melindungi lingkungan pertanian menjadi untuk tumbuh. Namun demikian ada beberapa desa di negara sedang berkembang ditempat prasarana produksi dan lingkungan hidup tidak teratur. Keuntungan pengalihan teknologi harus tersebar lagi secara luas melalui desa tersebut. Satu jalan yang sedang dicoba untuk mendapatkannya adalah mendirikan beberapa model zona yang terpilih dimana prasarana dasarnya telah ditingkatkan sementara merangsang pertanian lokal. Diharapkan petani akan berpartisipasi didalam aktivitas zona ini dan dengan demikian membawa teknik dari desa ke desa.

### 1.3. *Survey perumusan proyek*

Pembangunan yang benar untuk Wilayah Indonesia bagian Timur didominasi oleh pertanian yang terbelakang merupakan pertanyaan besar. Pendekatan pembangunan menyeluruh yang memiliki pengaruh penyebaran lokal di perhatikan.

Hasil dari survey diatas adalah dasar untuk Pembangunan Pertanian dan Pedesaan terpadu di Sulawesi Tenggara. Yang ditargetkan pada lima kabupaten dan delapan desa di Bagian Kendari. Tim formasi survey proyek JICA mengirim kedacrah untuk menentukan arah dan pedoman untuk alih teknologi berorientasi proyek (15 sampai 25 Maret 1990). Tim survey formasi proyek memeriksa sifat kebutuhannya, mengadakan rapat, menandatangani hasil rapat dan membawa keatas renana tahunan detail setelah proyek mulai. Empat elemen berikutnya menjadi pusat proses ini:

- 1) Isi dan posisi rencana pembangunan daerah dan hubungan antarapembangunan desa dan rencana pembangunan daerah.
- 2) Potensi kerjasama di pembangunan desa dan posisi kerjasama dipembangunan daerah.

- 3) Studi potensi untuk kerjasama Jepang dan sifat kerjasama tersebut.
- 4) Arah dan petunjuk untuk formasi proyek.

Tabel 2-7 Tim Survey Formasi Proyek (15 -- 25 Maret 1990)

Penugasan	Nama Anggota	Organisasi yang membawahi
Supervisi Umum	Kenzo Takeuchi	Seksi Desain Konstruksi Biro Perbaikan Struktur, Kementerian
Rencana Kerjasama	Osamu Seino	Seksi Kerjasama Internasional, Ekonomi
Kerjasama Teknik	Masao Takai	Seksi Daerah Kesatu, Departemen Perencanaan, JICA
Pengembangan Pertanian	Kotaro Fujiwara	Seksi Penyuluhan Hasil Pertanian, Divisi Pemasaran Produk Biro Administrasi Pertanian Daerah Kato, MAFF
Koordinasi	Nobuharu Usuki	Seksi Pembangunan Pertanian Departemen Kerjasama Pembangunan Pertanian, JICA

Isi studi proyek formasi di ringkas sebagai berikut:

**(1) Formasi kunsensus pada koperasi pembangunan desa**

Pembangunan proyek koperasi desa diharapkan dapat mencapai koperasi petani yang memperoleh manfaat dan dapat membangun organisasi petani agar dapat menjamin pembangunan yang tangguh. Mereka juga bekerja untuk mengadakan system yang menyeluruh untuk menyalurkan petunjuk setempat yang layak yang akan menjalankan dari pengelolaan perencanaan dan pengelolaan pelaksanaan ke pengelolaan pertanian, pengolahan dan pemeliharaan. Elemen ini dikombinasikan kedalam bentuk baru koperasi. Telah diterangkan bahawa skema seperti itu hanya dapat diselesaikan dengan lengkap melalui kerjasama koperasi yang berteknologi proyek orientasi dan posisi ini telah disetujui.

**(2) Tujuan**

Kerjasama semacam bertujuan mencari partisipasi petani setempat disetiap tahap pembangunan prasarana. Teknik praktek pengembangan setempat harus juga diberikan perhatian penuh pada proses tersebut dengan menggunakan bahan setempat dan dengan metoda banyak mempekerjakan tenaga buruh. Pada proses ini tenaga ahli dan konterpartnya harus memberikan kepada petani kunci pelatihan teknik praktek dilapangan dan memberikan petunjuk disemua tahap proyek, dari mulai rencana sampai desain. Serta pada pembangunan fasilitas dan pada pengelolaan operasional, pengelolaan air dan pertanian serta pelaksanaan organisasi petani.

**(3) Isi proyek**

Pekerjaan berikut ini dilaksanakan sehubungan dengan pertimabnagu partisipasi.

- a) Perencanaan model pembangunan pedesaan.

- b) Perbaiki prasarana pertanian.
  - c) Demonstrasi dan penyebaran teknik pertanian
  - d) Organisasi petani.
- (4) **Pelatihan kepada para petani kunci dan tenaga ahli teknik kantor desa setempat.**
- a) Pengiriman tenaga ahli.
  - b) Penerimaan konterpart untuk training.
  - c) Mengadakan mesin dan peralatan.
  - d) **Beragam-macam: Menunjang pengeluaran perbaikan prasarana pertanian.**
- (5) **Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh pihak Indonesia**
- a) Mengadakan kantor.
  - b) Kesepakatan konterpart dan staf yang lain.
  - c) Pengadaan biaya yang perlu untuk operasi proyek.
  - d) Koordinasi yang perlu untuk pelaksanaan proyek
  - e) Memilih model daerah.
- (6) **Tugas kerjasama teknik**
- a) Ditempat telah ada sedikit pengalaman mengenai kerjasama koperasi tetapi ditempat belum didirikan metoda kerjasama sebagai unsur paket keras dan lunak yang menyeluruh. Oleh karena itu bantuan dan studi perlu sebagai tanggapan kepada pembangunan koperasi.
  - b) Pembangunan prasarana harus dilaksanakan dengan bantuan yang fleksibel dan menerus untuk biaya setempat proyek tersebut.
  - c) Tenaga ahli dengan pengetahuan detail daerah proyek harus disediakan dan susunan bantuan diorganisir sebagai partner negara, untuk memastikan kemajuan yang lancar dalam membentuk organisasi petani. Isi kerjasama di pihak Jepang

- d) Kerjasama semacam ini akan mempunyai dampak pukulan yang penting di daerah dan sedikit pengalaman proyek, dengan demikian keadaan kerjasama pelaksanaan harus diikuti terus dan dengan alat pengukur yang sesuai.
- e) Kelompok studi menerangkan bahwa dasar pendekatan fihak Jepang dalam kerjasama teknik tipe proyek yang direncanakan dan dicapai dari konsensus konsep dasar Departemen Pertanian Indonesia (Deptan), Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), instansi terkait di Sulawesi Tenggara dan fihak lain.

#### 1.4. *Permintaan kerjasama teknik untuk tipe proyek*

Pemerintah Indonesia menyerahkan permintaan resmi tanggal 22 Juni 1990 kerjasama teknik tipe proyek dalam rencana tersebut diatas. Sebagai tanggapannya Jepang memberitahukan pada Pertemuan Konsultasi Tahunan pad Kerjasama Teknik dan program Hibah kepada Indonesia (Jakarta, 28 – 29 Juni 1991) bahwa “Kami telah menerima dan memakai permintaan dan akan mempelajari hasil tim studi pada waktu yang tidak lama, yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek”.

#### 1.5. *Survey jangka panjang*

Setelah persetujuan yang dibuat pada Pertemuan Konsultasi Tahunan kelompok kesembilan anggota survey jangka panjang mengirim dari bulan September 1990.

Hasil studi Jepang dan Indonesia yang lalu mengenai pembanunan pertanian dan daerah pedesaan Propinsi Sulawesi Tenggara dan bahan-bahan didiskusikan dalam pertemuan telah diambil sebagai dasar diskusi lebih lanjut dengan wakil Indonesia yang terkait dan bidang yang studi juga dibuat. Unsur tersebut membentuk survey jangka panjang yang diikuti jadwal sebagai berikut. Tujuannya untuk menentukan secara luas kerangka kerja kerjasama teknik tipe proyek dalam rencana diatas dan membuat konsep rencana untuk operasi tersebut.

##### (1) **Periode permulaan proyek (6 – 16 September 1990)**

- a) **Penjelasan kerangka kerja kerjasama teknik tipe proyek**

Kerangka kerja kerjasama teknik tipe proyek didalam pembanunan pertanian dan daerah pedesaan terpadu Propinsi Sulawesi Tenggara (sifat kerjasama, rencana biaya untuk Jepang dan fihak Indonesia, jadwal pelaksanaan dan hal lain) telah diterangkan dan diskusikan bersama-sama usulan Jepang berdasarkan pada diskusi yang lalu dan kemajuan yang telah dibuat..

b) Prasurey untuk survey jangka panjang

Fihak Jepang menerangkan isi, jadwal dan aspek lain survey dan membuat perbaikan bila perlu. Hal ini juga ditanyakan fihak Indonesia untuk menyediakan fasilitas yang perlu dan menunjuk konterpart.

(2) Periode survey (melanjutkan dan survey tambahan) (16 September 1990 – 18 November 1990)

Tim survey jangka panjang bekerja bersama dengan konterpart Indonesiannya, mulai berdasarkan diskusi yang diadakan di saat mulai survey dan menggunakan hasil survey terdahulu. Mengenai hal ini mereka menambahkan lebih lanjut detail tambahan survey lapangan dan pertukaran pandangan sehubungan dengan instansi terkait untuk mendapatkan persetujuan bilateral pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Garis besar rencana pembangunan pertanian dan daerah pedesaan terpadu di delapan desa yang ditargetkan oleh rencana.
- b) Bagian rencana pembangunan pertanian dan prasarana daerah pedesaan yang akan dilaksanakan melalui kerjasama.
- c) Konsep rencana untuk pelaksanaan kerjasama teknik tipe proyek.
- d) Kondisi yang dipegang mengenai pelaksanaan kerjasama.

(3) Periode penyelesaian proyek (30 Oktober 1990 – 8 November 1990)

Pertukaran detail pandangan telah dibuat berdasarkan temuan survey jangka panjang untuk mencapai persetujuan dasar dari kerjasama teknik yang terkait dengan kerjasama teknik tipe proyek.

Tabel 2-8 Anggota Survey jangka Panjang

Jenis survey	Penugasan	Nama Anggota	Organisasi yang Membawahi	Pengiriman Tim
Periode permulaan proyek (Penjelasan kerangka kerja proyek) Survey lanjutan	Supervisi Umum	Makoto Shimada	Biro Perbaikan konstruksi, MAFF	1990/9/6-1990/9/16
	Rencana Kerjasama	Yoshitaka Sumi	Departemen Kerjasama Pembangunan, JICA	Idem
	Pembangunan Pedesaan	Noboyushi Kayano	Perwakilan Pembangunan Lahan pertanian (JALDA)	1990/9/6-1990/11/8
Survey tambahan Periode penyelesaian proyek	Rencana pelaksanaan	Tatsuo Matsunaka	Perwakilan Pembangunan Lahan pertanian (JALDA)	Idem
	Rencana pertanian	Yoshiya Takashima	Perwakilan Pembangunan Lahan pertanian (JALDA)	Idem
	Masyarakat petani	Shin Kawanaka	Spesialis, JICA	1990/10/4-1990/10/20
Kebijaksanaan kerjasama Pembangunan pertanian Rencana kerjasama		Akira Kuribayashi	Biro Kerjasama Ekonomi, Kementerian Luar Negeri	1990/10/30-1990/11/8
		Nebuharu Usuki	Biro Perbaikan konstruksi, MAFF	Idem
		Yoshitaka Sumi	Departemen Kerjasama Pembangunan, JICA	Idem

1.6. Pelaksanaan Diskusi Survey

Pemerintah Jepang dan JICA mengirim tim survey proyek formasi pada maret 1990 dan permintaanny secara resmi diterima pada Pertemuan Konsultasi Tahunan di Indonesia pada Juni tahun itu. Survey jangka panjang dilaksanakan mulai September pada tahun yang sama dan tim pelaksana diskusi survey diterima pada Januari 1991. Proses ini dimulai dengan penanda tanganan dan pertukaran Laporan Diskusi (R/D) pelaksanaan kerjasama dan Skema Perkiraan Pelaksanaan (TSI).

Tabel 2-9 Tim Pelaksana Survey Diskusi (16 Januari 1991 – 27 Januari)

Penugasan	Nama Anggota	Organisasi yang membawahi
Ketua Tim	Yasuto Kikuoka	Seksi Pembangunan, Biro Perbaikan Struktur, MAFF
Wakil Ketua Tim	Takeo Shimizu	Seksi Departemen Kerjasama Teknik Pertanian, Departemen Kerjasama Pembangunan Pertanian, JICA
Perencanaan Kerjasama	Hiroshi Takazawa	Seksi Kerjasama Internasional, MAFF
Pembangunan Peesaan	Nobuyoshi Kayano	Departemen Aktivitas Luar Negeri, Perwakilan Pembangunan Lahan pertanian Jepang (JALDA)
Koordinasi	Yoshitaka Sumi	Departemen Kerjasama Pembangunan, JICA

Oleh karena itu proyek ini diklasifikasikan sebagai rencana Gersamata (Pembangunan Pedesaan dengan Kemakmuran yang dapat dibagi rata) yang ditujukan untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh desa pertanian di Sulawesi Tenggara. Dengan alih teknik yang sesuai dengan daerah dan yang dapat menyeimbangkan pembangunan daerah dan mengentaskan kemiskinan. Tujuan terakhir ini juga tujuan prioritas Rencana Nasional Pembangunan Lima Tahun. Kerjasama teknik Jepang untuk membantu proses percobaan selama masalah ini.

(1) Konsep Dasar

Lima Kabupaten dan delapan desa di Kendari, setiap perbedaan produksi pertanian dan kondisi sosial dan ekonomi diadakan studi dan rencana pembangunan dipikirkan untuk petak individual dilapangan, yang dibuat menjadi berkondisi disetiap petak. Berdasarkan rencana ini keadaan berikut ini telah dilaksanakan sebagai model-model yang pertanian yang menyeluruh dan pembangunan pedesaan.

- Perbaikan dasar produksi lahan dan fasilitas pertanian.
- Mengenali mesin pertanian, mesin pembersih lahan dan konstruksi yang sesuai.
- Demonstrasi praktek dan pelatihan di pertanian dan teknik pengolahan.
- Perbaikan dan pemeliharaan organisasi pertanian.

Keadaan ini, pembangunan daerah dan kondisi sosial, bertujuan menaikkan produktivitas pertanian, mendorong deversivikasi pertanian yang kompak, menaikkan pendapatan dari

pertanian, menstabilkan produksi, menghayati ulang desa pertanian dan menaikkan standar kehidupan.

Tujuan selanjutnya adalah mempertinggi kemampuan konterpart Indonesia, staf pemerintah daerah dan petani kunci disertakan dalam seluruh proses dari perencanaan sampai pelaksanaan. Hal ini akan mendorong penyebaran dampak ikutan dari proyek sampai daerah disekelilingnya yang belum berkembang dan ikut kondisi semacam. Tipe model pembangunan dipilih untuk delapan desa di lima kabupaten diperlihatkan pada Tabel 2-10 dibawah ini.

Tabel 2-10 Tipe Model Pembangunan Desa.

Nama Kabupaten	Nama Desa	Tipe Pembangunan	Tingkat pelaksanaan
Ranometo	Ranometo	Pembangunan pertanian dan pedesaan terpadu dekat dengan daerah perkotaan.	1
	Onewila	Pembangunan sawah berkelompok melalui perbaikan drainasi.	7
Palangga	Palangga	Pembangunan desa melalui pengelolaan kompak lahan kering, perkebunan dan padi basah.	2
	Kiaca		3
Lainea	Laeya	Pembangunan lahan yang tidak digunakan, terutama daerah kering, perkebunan dan peternakan.	6
Tinanggea	Lalobao Lapulu	Pembangunan pertanian dan desa terpadu, dipusatkan pada tanaman lahan kering.	4
Landonno	Sabulakoa	Pembangunan padi golongan melalui perbaikan prasarana pertanian.	8

(2) Isi kerjasama

a) Tugas kerjasama

i) Memikirkan perencanaan untuk pembangunan pertanian dan pedesaan terpadu.

- Rencana pola tanam, pola tata guna tanah, pertanian.
- Rencana prasarana pertanian dan perbaikan reklamasi lahan.

ii) Perbaikan pembangunan pertanian dan pedesaan.

- Perbaikan prasarana pertanian dan reklamasi lahan (reklamasi lahan untuk sawah dan sawah lahan kering, fasilitas irigasi dan jalan pertanian, dan lain-lain).
- Perbaikan prasarana pertanian (penggilingan berasi, gudang bibit, halaman penggemukan, halaman pelelangan dan sebagainya)
- Pameran teknik pertanian yang sesuai.
- Penanaman padi.
- Penanaman tanaman lahan kering.
- Penanaman tumbuhan hijau.

- iii) Pengenalan dan operasi mesin yang sesuai, pemeliharaan dan teknik pengolahan.
- iv) Organisasi petani, wanita, penguatan dan pemberian pengetahuan organisasi pengelolaan air dan sebagainya.
- v) Pelatihan dan pemberian pengetahuan kepada staf pemerintahan daerah dan petani kunci.
- b) Periode kerjasama  
Maret 1991 – Februari 1997 (6 bulan)
- c) Lokasi proyek  
Desa : Lima kabupaten dan delapan desa di Walikota Kendari  
Propinsi Sulawesi Tenggara  
Kantor proyek : Walikota Kendari, Kota Kendari
- d) Perwakilan pelaksana di Indonesia  
Perwakilan pelaksana : Kementerian Pertanian  
Perwakilan kerjasama : Pemerintahan propinsi, kantor daerah setiap kabupaten.
- e) Isi kerjasama fihak Jepang
  - i) Pengiriman tenaga ahli
    - Tenaga Ahli jangka panjang ( 7 orang ) :
    - Ketua tim dan pembangunan daerah berjalan bersama, perbaikan pembangunan pertanian dan pedesaan, pembangunan fasilitas, supervisi konstruksi, supervisi pertanian, pengoperasian mesin dan pemeliharannya, memperkuat organisasi petani, koordinasi proyek.
    - Tenaga Ahli jangka pendek (3 sampai 4 orang setahun)
    - Ekonomi pertanian, pengolahan pasca panen, peyediaan bibit, analisa tanah, pengendalian hama penyakit dan kerusakan hama dan sebagainya.
    - Lain-lain.
    - Partisipasi tenaga ahli Indonesia dalam penghijauan (khususnya tanaman perkebunan) atas biaya fihak Jepang.

- ii) Penerimaan para peserta pelatihan; Latihan di Jepang untuk 3 – 4 peserta setahun, terutama diantara para konterpart.
- iii) Syarat peralatan: Mesin dan alat –alat untuk untuk konstruksi dan operasi pertanian dan peralatan untuk latihan dan pendidikan.
- iv) Jaya yang dikeluarkan setempat
  - Biaya proyek untuk proyek perbaikan prasarana.  
Biaya untuk pelaksanaan proyek untuk reklamasi lahan dan perbaikan prasarana di pertanian desa akan dibebankan dari lokal.
  - Biaya untuk menguji pelatihan tenaga ahli teknik kunci.

**(3) Rencana pelaksanaan kerjasama yang konkrit**

Tujuannya untuk meningkatkan tingkat teknik pertanian dan konstruksi oleh satu atau dua tingkat di lima kabupaten dan delapan desa yang terpilih sebagai lokasi tempat proyek. Proyek yang diterangkan dibawah akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu.

a) Pengenalan mesin pertanian

Traktor tangan (untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk bercocok tanam) dan mesin semprot akan diperkenalkan untuk memajukan penggunaan yang efisien lahan pertanian dan menambah panen dan mesin perontok akan diperkenalkan untuk mempercepat proses pasca panen.

b) Uji praktis dan demonstrasi teknik penanaman

Percobaan penanaman akan dilakukan dilapangan dipusatkan pada tanaman lokal untuk mendemonstrasikan teknik penanaman dan menyajikan bukti kemampuan mereka. Peningkatan penanaman setiap tanaman akan dibuktikan di uji lapangan dan diperbandingkan dengan metoda penanaman biasa.

c) Rencana perbaikan pertanian

i) Perbaikan tingkat penggunaan lahan

Pekerjaan pertanian akan dilakukan secara mekanis dan mekanisasi ini akan dilakukan dengan teknik penanaman secara terpadu agar dapat memperbaiki tingkat penggunaan

lahan daerah. Peningkatan tingkat penggunaan lahan akan membawa kepada penambahan nyata di daerah pertanian.

**ii) Perbaiki teknik penanaman**

Perbaiki tanah pertanian melalui pembajakan tanah yang dalam dan penambahan bahan organik.

- Pengadaan pengendalian waktu yang sesuai dan pengendalian penyakit di daerah yang luas dan kerusakan oleh serangga.
- Panenan dengan waktu yang sesuai dan proses pasca panen yang cepat.
- Memajukan keadaan anti erosi dilapangan
- Memajukan penanaman sayuran di sawah dekat daerah perkotaan.

**d) Perbaiki prasarana pertanian**

Untuk meningkatkan tingkat perbaikan prasarana, sumber daya lahan yang tidak terpakai akan digunakan untuk persiapan lahan bertani dan fasilitas yang sesuai kawasan tersebut, akan ditambahkan, dengan pertimbangan agar dapat memberikan konservasi (perlindungan) bagi lingkungan kawasan itu. Tingkat perbaikan ini akan sedemikian rupa sehingga para petani mampu melanjutkan kegiatan perbaikan tersebut bagi keperluan mereka sendiri dikemudian hari.

**i) Fasilitas pengambilan**

Keamanan fasilitas bangunan pengambilan pada waktu banjir akan dijamin dengan membuat perkuatan bangunan dasar antara lain pondasi bendung, perkuatan tebing dan pencegahan bahaya pengikisan di hulu dan hilir.

**ii) Saluran Irigasi**

Petak daerah irigasi dalam satuan luasan terkecil akan direncanakan sehingga memungkinkan saluran irigasi berkemampuan mengangkut air dan membagi air dengan layak pada musim kering. Pengelolaan air akan diterapkan dalam unit ini.

**iii) Jalan Pertanian**

Jaringan jalan yang paling sedikit diperlukan untuk melewati mesin pertanian dan sarana pengumpul serta pengirim hasil pertanian akan dibangun.

iv) Pembangunan Lahan Pertanian

Lahan yang tidak terpakai dan belukar makin meluas akan dibangun menjadi lahan pertanian.

e) Transfer Keteknikan

Pelaksanaan proyek di atas merupakan kesempatan untuk mengadakan alih keahlian dan keteknikan kepada staf pemerintah daerah dan para petani pelopor. Keahlian ini terdiri atas metoda untuk menciptakan rancang bangun pertanian dan pedesaan, estimasi perencanaan, pengelolaan konstruksi, teknik pertanian, pemeliharaan dan pemberdayaan organisasi petani.

1.7. *Karakteristik Proyek*

(1) **Kerjasama pembangunan pedesaan dan pembangunan prasarana pedesaan**

Pembangunan pedesaan pada proyek kerjasama asing dapat bersesuaian dengan gerakan kegiatan pedesaan di Jepang. Hal tersebut berbeda dengan "Pembangunan prasarana pertanian" tetapi sejalan dengan "Pembangunan prasarana pedesaan" untuk maksud pengembangan lingkungan pedesaan yang menyenangkan dalam arti sempit.

Berkenaan dengan proyek pembangunan di Jepang, dibandingkan dengan proyek pertanian dan proyek pembangunan yang merupakan inti proyek pembangunan lahan konvensional, terdapat beberapa perbedaan pokok yang dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama program pembangunan lahan dirumuskan untuk mewujudkan proyek yang agak luas dipandang dari sudut efisiensi investasi, yaitu rasionalisasi orientasi ekonomi dan proyek pembangunan lahan pertanian ini sebagai contoh yang layak. Proyek pembangunan pedesaan, sebaliknya, adalah proyek yang memusatkan kegiatan pada pembangunan pedesaan yang menyenangkan yang dapat dilihat pada berbagai proyek yang disebut "Proyek Percontohan", "Proyek Percontohan Terpadu" dan "Proyek Terpadu Kecil". Bila ukuran proyek terlalu kecil untuk menerima program proyek sekarang, maka diciptakan proyek baru untuk mengangkat proyek yang kecil tersebut. Dengan kata lain proyek pembangunan pedesaan diposisikan sebagai pelengkap untuk proyek pembangunan lahan pertanian, tetapi tidak memosisikan dirinya sebagai konsep pengembangan bebas dalam artian kelembagaan proyek.

Yang kedua adalah, sementara proyek pembangunan pedesaan dipertimbangkan untuk menjadi proyek terpadu dengan pengembangan lingkungan yang menyenangkan dan pembangunan prasarana produksi sebagai sebuah proyek berskala kecil atau pengembangan lingkungan yang menyenangkan, maka proyek pembangunan pedesaan akan memiliki karakteristik alami yang disebut "Gerakan orang desa". Sebaliknya proyek pembangunan pedesaan akan berkembang

menjadi program pendukung terhadap "Gerakan orang desa" dengan memanfaatkan teknologi pembangunan lahan. Kecenderungan ini nampaknya menjadi menarik karena konsep proyek pembangunan pedesaan yang pada saat penetapan kelembagaan berfungsi sebagai pelengkap pembangunan lahan justru fungsinya menjadi berlebih. Persentuhan antara proyek pembangunan pedesaan dengan gerakan pembangunan desa adalah sebagaimana dinyatakan dalam dua hal diatas.

### (2) Kerjasama JALDA dalam pembangunan pedesaan asing

Sulit dipercaya bahwa karakter proyek pembangunan pedesaan bangsa Jepang sebagaimana diuraikan diatas dapat diterapkan dalam "kerjasama pembangunan pedesaan". Namun apabila kerjasama pembangunan pedesaan dipandang dari sudut keteknikan sipil pertanian, maka tujuan proyek pembangunan pedesaan di Jepang dapat menjadi referensi yang dipertimbangkan.

Dari sudut pandang ini, kita dapat membedakan proyek yang melakukan pembangunan berskala besar terhadap basis produksi yang dapat disebut "kerjasama pembangunan pertanian" dengan yang berkerjasama secara rinci, yaitu pembangunan berskala kecil untuk desa pertanian. Macam yang disebut belakangan ini dapat dinamakan "Kerjasama dalam pembangunan pedesaan di Negara Asing".

Berbagai macam proyek pembangunan pedesaan dan pertanian di negara berkembang biasanya memerlukan usaha bimbingan kerjasama mandiri di negara berkembang, dari kerjasama tingkat masyarakat desa yang akan membantu pengembangan sumber daya manusia dengan tulus dan hati-hati dan pembangunan pedesaan di negara berkembang yang harus dilakukan.

Difihak lain macam kelembagaan dan riset dan macam pusat keteknikan yang bekerjasama dalam sektor pertanian telah bertambah, dan hubungan antara bentuk kerjasama tersebut dengan keadaan petani yang sesungguhnya adalah secara tidak langsung. Akan diperlukan banyak waktu untuk memperluas hasil kerjasama pada tingkat petani dan merefleksikan produksi pertanian yang meningkat.

Dalam pandangan ini kerjasama pembangunan desa terpadu, yang berkembang dari aspek keras ke aspek lemah yang dapat menghasilkan pembangunan yang berkesinambungan setelah bekerjasama dan menyadarkan rasa kesatuan dari kelompok pedesaan yang juga merupakan dukungan terhadap usaha mandiri di negara berkembang, harus dilaksanakan.

Kerjasama pembangunan pedesaan yang telah diprakarsai oleh JALDA mewujudkan terjadinya pengiriman tenaga ahli, perlengkapan peralatan dan penyiapan pengadaan dana lokal bagi prasarana pertanian dan kerjasama pembangunan pedesaan yang menyenangkan atas partisipasi para petani yang tinggal di tempat tersebut.

Dengan kerjasama ini akan terwujud kegiatan untuk menghimpun kelompok petani, memberdayakan masyarakat pedesaan, menyeimbangkan dan melangsungkan pembangunan pedesaan yang berkesinambungan dan mewujudkan kemandirian masyarakat daerah.

Perbandingan antara proyek-proyek kerjasama dalam bentuk kerjasama teknis proyek bertipe konvensional dan kerjasama pembangunan pedesaan yang diprakarsai JALDA adalah sebagai berikut :

No	Butir	Kerjasama teknis tipe Proyek Konvensional		Kerjasama pembangunan pedesaan oleh JALDA
		Pembangunan Pertanian Daerah	Tipe teknis terpusat dan tipe riset	
1.	Maksud	Mempromosikan pembangunan pertanian pedesaan melalui pengembangan dan perluasan teknis konsolidasi tanah, manajemen air dan pertanian	Riset dan pembangunan teknologi untuk hal khusus, misalnya pemeliharaan tanaman yang berfaedah	Pembangunan pedesaan dan pembangunan sumber daya manusia dengan pendekatan keikutsertaan dalam pembangunan prasarana pedesaan.  Kedua macam pembangunan pedesaan yaitu teknologi "keras" dan "lunak"
2.	Konterpart	Spesialis senior tanaman tanah, pengembangan, irigasi dsb. pada perwakilan umum	Petugas riset pada pusat riset umum dan ahli teknik senior di pemerintahan	1. Para ahli teknik pemerintah daerah dalam bidang irigasi, manajemen air, perkebunan, pengembangan dan lain-lain. 2. Para petani pelopor dari berbagai organisasi misal organisasi petani, fasilitas pengoperasian, organisasi pembangunan desa dan lain-lain.
3.	Cara pengelolaan proyek	Transfèr teknologi kepada para konterpart melalui demonstrasi dan pekerjaan pengembangan dalam model pertanian	Transfèr teknologi kepada para konterpart melalui riset bersama	1. Para petani penerima bantuan itu sendiri berpartisipasi dalam semua tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pengembangan teknis yang sesuai dengan komunitas lokal dan transfèr teknologi kepada para konterpart dan petani melalui on the job training, misal survai, desain, pelaksanaan proyek oleh JALDA). 2. Transfèr teknologi kepada para konterpart melalui demonstrasi dan penyajian dengan model pertanian.
4.	Hal penting	Pelatihan tenaga ahli dan ketua dalam pemerintahan	Pencarian buah-buahan dalam riset	1. Mengutamakan teknologi "lunak" misal pemberdayaan organisasi petani. 2. Mencapai dengan segera hasil kerjasama melalui partisipasi petani. 3. Memperluas ukuran pengembangan desa di sekitar wilayah proyek dengan mengembangkan teknologi yang sesuai dengan komunitas lokal, pemberdayaan organisasi petani dsb.

Sasaran yang dituju dapat diringkas sebagai berikut :

- a) Penyesuaian terhadap penyimpangan yang timbul dalam sasaran dari modernisasi dalam bidang pertanian yang dipromosikan dan permasalahan-permasalahan yang hilang dalam proses.
- b) Mendukung aktifitas bebas petani yang mengakar pada tradisi lokal yang tidak cocok dengan rasionalisasi ekonomi.

- c) Pemantapan kehidupan buruh tani yang tidak mempunyai lahan yang menjadi salah satu sasaran dari modernisasi pertanian.

**(3) Konservasi lingkungan dalam kerjasama untuk pembangunan desa**

Harus dikatakan bahwa adalah sia-sia membangkitkan secara terbuka persoalan konservasi lingkungan apabila berusaha mengadakan sebuah gerakan orang-orang desa di luar kerjasama pembangunan pedesaan.

Walaupun begitu sering terjadi bahwa perkebunan modern yang berkembang disebabkan oleh pembangunan pertanian menjadi sebuah penyebab kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penyebab tak langsung yang ditimbulkan oleh daerah yang tertinggal oleh modernisasi tersebut. Demikian juga, akan diuraikan kemudian, rehabilitasi yang cepat dari daerah yang semula diterapkan pengolahan bergilir dan kembali ke pemanfaatan pertanian akan dapat menciptakan sebuah lingkungan alami yang baru, yang menghasilkan sebuah kontribusi besar terhadap konservasi lingkungan. Oleh karena itu, meskipun apabila konservasi lingkungan langsung tidak merupakan tujuan, hasilnya akan dapat menjadi sebuah kontribusi utama terhadap penyebab tersebut. Dalam hal itu kerjasama untuk pembangunan desa harus diakui sebagai suatu bentuk yang efektif dari konservasi lingkungan. Kerjasama untuk pembangunan desa adalah suatu ungkapan yang sering diceritakan dalam kaitan dengan konservasi lingkungan global dan nampaknya menjadi contoh yang baik dari konsep "Berfikir global, bertindak lokal".

Indonesia telah melaksanakan kebijaksanaan yang kuat untuk modernisasi pertanian, dengan penekanan pada lahan padi, dan hal ini telah mendatangkan keberhasilan. Negara tersebut sekarang menikmati hampir seluruh swasembada dalam bahan baku pangan dan sedang bergerak menuju sebuah periode baru dari kemajuan. Bagian utama dalam usaha modernisasi di Indonesia telah melahirkan dengan sukses, petani kelas atas yang dapat menghasilkan manfaat yang luas dari produksi yang surplus. Para petani kelas bawah yang tidak berlahan diuntungkan terhadap adanya perluasan kesempatan untuk memperoleh bidang pekerjaan yang bertambah dan peningkatan upah, tetapi hasil lain dari modernisasi ini telah mewujudkan peningkatan kesenjangan antara petani tingkat atas dan bawah. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh peningkatan kesenjangan ini adalah merupakan manifestasi tipikal terhadap adanya perkumpulan pertanian yang bersifat kerjasama.

Teknik tradisional untuk perkebunan yang intensif di daerah ini adalah agro - kehutanan dengan menggunakan tanah pekarangan. Hal ini merupakan sebuah sistem teknologi lanjut untuk perkebunan intensif yang memanfaatkan ekologi hewan dan tanaman kompleks yang khas untuk daerah tropis. Cara ini tidak begitu cocok untuk produksi tanaman komersial, tetapi merupakan jalan yang bagus untuk mempersiapkan suatu pasokan swasembada pangan untuk keperluan harian. Ini adalah sistem tradisional dari teknis pertanian yang telah diterapkan dalam konteks lingkungan alam dari daerah. Ini merupakan suatu bentuk yang stabil dari penggunaan lahan yang

sangat cocok untuk lingkungan lokal. Sistem pekarangan adalah suatu sistem pekerja intensif yang menggunakan skala kecil yang diterapkan di sekitar tempat tinggal dan sejenisnya, yang sangat bagus dan terjangkau bagi petani tak beralahan. Masyarakat tidak terlalu berkepentingan melaksanakan metoda perkebunan modern namun bentuk perkebunan ini dapat mewujudkan kontribusi besar untuk kestabilan masyarakat pedesaan sebagai suatu metoda bagi petani tingkat atas maupun bawah yang dapat menghasilkan bagi diri sendiri suatu pasokan swa sembada pangan secara minimum.

Secara menyeluruh sistem pekarangan kemungkinan dapat memproduksi hasil terbesar bagi petani tingkat bawah. Pada umumnya lahan yang rusak yang ditinggal setelah pengolahan bergilir dapat dibeli dengan sangat murah dan dalam banyak hal dapat dibuat menjadi pekarangan. Apabila pekarangan ditekankan sebagai alat untuk membuka lahan bercocok tanam cara bergilir dan mempersiapkan petani tingkat bawah untuk memperoleh kebutuhan makanan harian mereka, berarti mereka membangun kembali pembangunan secara alami setelah pengolahan bergilir dan membantu memantapkan masyarakat pedesaan. Cara ini dapat memainkan peran sentral dalam memanfaatkan lahan yang telah lusuh dan terbuang dalam artian efisiensi ekonomi dan modernisasi pertaniannya dan menghidupkan lagi lahan tersebut. Hal ini dapat merupakan sebuah proyek yang bernilai untuk melengkapi modernisasi pertanian yang dikonsentrasikan pada lahan padi. Lagi pula hal itu dapat mewujudkan kontribusi besar untuk konservasi lingkungan dalam skala global.

#### (4) Karakteristik proyek

Ini adalah proyek yang luas untuk keikutsertaan pembangunan pertanian dan pedesaan dengan karakteristik utama, sebagai berikut :

- a) Proyek ini bertujuan untuk mencapai pembangunan terpadu dengan cara mengatur kerjasamanya terhadap prasarana di daerah pedesaan, yaitu yang disebut "sisi keras" dan juga terhadap langkah yang berkaitan dengan "sisi lunak".
- b) Para petani penerima bantuan itu sendiri berpartisipasi di seluruh tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Prakarsa dalam memajukan pengembangan dilakukan oleh petani pelopor dan staf perwakilan yang terkait yang dikoordinir oleh pemerintah daerah.
- c) Prasarana dikembangkan dengan menggunakan tenaga kerja lokal dan bahan-bahan lokal yang tersedia.
- d) Organisasi petani, organisasi wanita dan kelompok-kelompok lain diberdayakan dan dibina agar menjadikan pembangunan daerah berkelanjutan.
- e) Jenis-jenis kegiatan yang diuraikan di atas mendorong usaha mandiri para petani dan memajukan alih pengetahuan serta meningkatkan teknis pembangunan pertanian dan

## ***II Isl Perencanaan Proyek***

pedesaan (pembangunan desa) kepada para petani pelopor dan staf perwakilan yang terkait yang dikoordinir oleh pemerintah daerah. Pengaruh yang terjadi dari proyek ini juga disebarluaskan ke daerah lain yang mempunyai kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang sama.

**2. Kerangka dan kegiatan proyek**

**2.1. Rancangan investasi dan hasil-hasilnya**

Untuk mencapai tujuan proyek, proyek-proyek kerjasama teknis yang dilaksanakan oleh Jepang akan dibangun dengan rancangan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengiriman para tenaga ahli dari JICA
- 2) Mengadakan pelatihan di Jepang.
- 3) Mengadakan penyediaan peralatan dan bahan.
- 4) Merencanakan pendanaan lokal.

**(1) Pengiriman para ahli dari JICA**

Team leader untuk proyek pembangunan daerah akan dikirim untuk jangka waktu lama bersama-sama dengan para tenaga ahli untuk bidang pembangunan pertanian dan prasarana pedesaan, bidang instruksi pada teknik perkebunan, bidang pengelolaan konstruksi dan pengembangan tanah pertanian, bidang O & M pengelolaan mesin, pemberdayaan organisasi pertanian, koordinasi administrasi dan bidang-bidang lain. Sebagai tambahan, tenaga ahli dalam bidang ekonomi pertanian, pengembangan peternakan, perencanaan bangunan fasilitas, analisa tanah, analisa hidrologi dan lain-lain bidang akan dikirim sesuai kebutuhan selama proyek berjalan. Kerjasama teknis mereka termasuk memberikan bimbingan, saran, ujian, difusi keahlian dan pendidikan yang diharapkan akan membantu secara luas dan efektif guna memajukan proyek.

Isi dari kerjasama teknis, yang dicatat dalam Tentative Scheme for Implementation (TSI) meliputi lima kategori sebagai berikut :

- 1) Memikirkan rancangan untuk pembangunan pertanian dan pedesaan terpadu.
  - Rancangan penggunaan lahan, pola tanam dan rancangan perkebunan.
  - Rancangan untuk pembangunan pertanian dan prasarana produksi.
- 2) Mengembangkan prasarana pertanian dan pedesaan.
  - Pembangunan prasarana pertanian dan prasarana produksi (pembukaan lahan untuk sawah dan ladang, pembangunan fasilitas irigasi dan jalan pertanian dan lain-lain).
  - Mengembangkan fasilitas pertanian (fasilitas pelatihan, penggilingan padi, penyimpanan benih, fasilitas penggemukan ternak dan lain-lain).

- 3) Demonstrasi teknis pertanian yang sesuai
    - Pengolahan padi
    - Pengolahan hasil tanaman dataran tinggi
    - Pengolahan tumbuh-tumbuhan yang tetap hijau (hasil perkebunan).
  - 4) Pemberdayaan dan pembinaan organisasi untuk petani, wanita, pemakai air dan kelompok lain.
  - 5) Pendidikan dan pelatihan staf pemerintah daerah, pendidik dan petani pelopor.
- a) Bidang keahlian pada penugasan jangka panjang
    - Leader (rancangan pembangunan daerah)
    - Pembangunan pertanian dan prasarana pedesaan
    - Pengawasan pelaksanaan pekerjaan
    - Pembangunan pertanian
    - O & M peralatan
    - Pemberdayaan organisasi petani
    - Koordinasi

b) Penugasan tenaga ahli untuk jangka pendek

Para tenaga ahli ditugaskan untuk berbagai bidang termasuk pengelolaan pasca panen, pelayanan perluasan pertanian, hama, analisa tanah, ekonomi pertanian, pengembangan peternakan, masyarakat pedesaan, persoalan wanita pedesaan dan bidang-bidang lain yang diperlukan.

c) Masukan status perolehan target

Sejumlah 12 orang tenaga ahli jangka panjang yang bertugas dalam bidang-bidang, Pembangunan pedesaan, Koordinasi, Pembangunan pertanian dan pedesaan, Pengelolaan Konstruksi, Pengelolaan O & M mesin, Pembimbing perkebunan, Organisasi pemberdayaan petani telah ditugaskan dalam proyek kerjasama selama enam tahun. Selain itu berdasar pada R/D sejumlah 26 tenaga ahli berjangka pendek telah dikirim untuk jangka waktu lebih dari 6 tahun.

Karena proyek dimulai pada tanggal 1 Maret 1995, yaitu kurang lebih satu bulan setelah ditandatangani R/D, dan pengiriman tenaga ahli berjangka panjang dimulai bulan Juni,

maka hal tersebut menyebabkan terjadinya penundaan saat mulai kerja.

Tabel 2 - 11 Status Pengiriman tenaga ahli jangka panjang

Nama Anggota	Bidang Tugas	Periode
Nobuyoshi Kayano	Ketua Tim/Pembangunan Pedesaan	1991. 6.5 - 97. 2.28
Soichi Ogasawara	Pengkoordinasian Perusahaan	1991. 6.5 - 97. 2.28
Tatsuo Matsunaka	Pembangunan Prasarana Pertanian dan Pedesaan	1991. 6.5 - 93. 8.8
Yoshiya Takashima	Petunjuk Pertanian	1991. 6.5 - 94. 6.4
Ryoji Tamakuma	Pengelolaan O&M Mesin	1991. 8.26 - 94. 8.25
Yoshihiko Nishimura	Pemberdayaan Kelompok Tani	1991. 8.26 - 94. 8.25
Fujiyoshi Hatanaka	Pengelolaan Konstruksi	1991. 10.14 - 93.10.13
Shuji Takaoka	Pembangunan Prasarana Pertanian dan Pedesaan	1993. 7.8 - 97. 2.28
Tokutaro Saita	Pengelolaan Konstruksi	1993. 9.29 - 97. 2.28
Teruhisa Namba	Petunjuk Pertanian	1994. 5.16 - 97. 2.28
Takao Kamo	Pengelolaan O&M Mesin	1994. 8.26 - 97. 2.28
Hajime Kikuchi	Pemberdayaan Kelompok Tani	1994. 8.16 - 97. 2.28

(2) Pelatihan

a) Pelatihan dan pendidikan di Jepang

JICA menerima kiriman konterpart Indonesia ke Jepang untuk dilatih dan dididik untuk kesesuaian dengan keperluan keahlian dan keteknisan, misal pembangunan pedesaan, pengolahan padi, mesin pertanian, pemberdayaan organisasi petani dan lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek.

Pelatihan konterpart dilakukan sesuai perencanaan, dengan jumlah sebanyak 19 orang yang dilatih di Jepang.

b) Alih keteknikan dan pelatihan di lokasi proyek

Proyek ini menekankan pada bimbingan untuk teknis pertanian yang dipusatkan di perkebunan percobaan dan demonstrasi di desa percontohan.

- 1) Sebuah kebun percobaan dan demonstrasi seluas 2 hingga 5 ha telah ditetapkan di desa Ranometo, ditempat bimbingan pertanian yang intensif telah dilakukan oleh tenaga ahli (dan bila perlu untuk perkebunan, oleh tenaga teknis Indonesia) untuk tenaga teknis tingkat menengah, tenaga kerja tambahan dan petani pelopor yang tinggal di daerah sekitar.
- 2) Di desa Palangga dan desa Kiaea, tenaga teknis tingkat menengah dan pekerja tambahan sangat berperan, mempersiapkan bimbingan untuk petani pelopor dan petani yang berkaitan sambil menerima saran dan bimbingan dari tenaga ahli bagi diri mereka sendiri.

- 3) Didesa-desa lain, petani pelopor yang telah menerima pelatihan mewakili kelompok inti yang dipersiapkan untuk menerima bimbingan. Para tenaga ahli dan pekerja tambahan mempersiapkan bimbingan.
- 4) Pararel dengan pelatihan lokal yang diuraikan diatas penyebarluasan kursus perkebunan diberikan dalam suatu jangka waktu yang berdasar pada Pusat Informasi Pertanian tingkat propinsi dan di tempat lain, dan perjalanan observasi untuk daerah berkembang di Indonesia juga di organisir sebagai bagian dari pelatihan selama jangka waktu kerjasama.
- 5) Kursus pelatihan serupa untuk Operasi dan Pemeiharaan pertanian dan peraiatan konstruksi dilaksanakan dengan partisipasi konterpart Pekerjaan Umum dan tenaga lulusan sekolah teknik menengah atau tenaga lulusan teknik pertanian atas.

Kursus Berkeliling Observasi Kemajuan Tingkat Domestik Utama

1)	Fasilitas irigasi, metoda pengelolaan air	Jawa Barat, Bali
2)	Teknik tata tanam padi	Jawa Timur
3)	Teknik tata tanam di dataran tinggi	Jawa Tengah
4)	Teknik pengolahan tanaman utama	Sumatera Utara
5)	Teknik pemeliharaan tanah	Jawa Tengah
6)	Aktifitas perkebunan	Bali
7)	Organisasi petani dan aktifitasnya	Jawa Barat
8)	Gaya hidup wanita pedesaan	Jawa Barat, Sumatera Barat
9)	Mekanisasi Pertanian	Jawa Timur, Jawa Barat

**(3) Pengadaan peralatan dan bahan**

a) Rencana pengadaan

Peralatan dan bahan yang diperlukan untuk proyek memperoleh bantuan dari Jepang. Peralatan tersebut terdiri atas peralatan untuk konstruksi yang diperlukan untuk pengembangan lahan, mesin pertanian untuk bimbingan pengelolaan pertanian, peralatan bercocok tanam, alat-alat untuk pelatihan dan survai, peralatan peternakan, peralatan difusi informasi, peralatan meteorologi, kendaraan dan sebagainya.

Alat-alat berat, peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk proyek dipersiapkan sebagaimana disebutkan dalam lampiran, dengan total biaya diestimasi sebesar ¥ 250,105,000.

Kecuali untuk beberapa macam alat pengujian dan survai, alat-alat lain dapat diperoleh di Indonesia. Diantara alat ini, alat pertanian dapat diperoleh di Kota Kendari. Demikian juga alat untuk konstruksi dapat diperoleh di Ujung Pandang, diduga pengadaan alat di Jakarta akan lebih layak dengan mempertimbangkan waktu pengiriman dan jumlah penyediaan alat yang banyak.

b) Pengadaan peralatan

Antara tahun 1991 dan 1996, peralatan lokal yang ada sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 -12.

Tabel 2 -12 Pengadaan Alat (Produksi Lokal)

FY	Peralatan Utama	Harga (1.000 yen)
1991	Alat-alat Konstruksi (bulldozer, back hoe, truck, dsb)	97,216
1992	Alat-alat Pertanian (tractor, perontok, alat pengolah lahan)	70,401
1993	Alat-alat Peternakan (jembatan timbang untuk ternak, truck, kendaraan pendingin, dsb.)	27,888
1994	Alat-alat Difusi Informasi (TV, OHP, video camera, dsb.)	21,599
1995	Alat-alat Meteorologi Alat-alat Pemeliharaan Kendaraan (Jeep, sepeda motor, dsb.) dan lain-lain	26,421
1996		6,580
Total		250,105

(4) Perencanaan pendanaan lokal

Dana yang diperlukan untuk pembangunan pertanian dan prasarana pedesaan, termasuk pembangunan lahan pertanian, perbaikan tanah, konstruksi fasilitas irigasi, konstruksi jalan, konstruksi fasilitas pertanian dan lain-lain telah dipersiapkan. Dana yang diperlukan untuk bimbingan dan pelatihan, pelatihan perluasan pertanian, teknologi pertanian pada lahan demonstrasi untuk padi dan tanaman dataran tinggi, bagi tenaga teknis menengah, tambahan pekerja dan petani pelopor telah disediakan. Dana untuk pelatihan pada penetapan asosiasi pengguna air dan pemberdayaan organisasi petani, pekerja teknis tingkat menengah juga telah dipersiapkan. Dana untuk peralatan pertanian yang diperlukan untuk bekerja sama dengan baik di setiap bidang keteknikan, upah untuk instruktur dan biaya perjalanan diberikan sesuai keperluan dan ditentukan dalam tahapan tambahan.

a) Rencana Anggaran

Estimasi biaya konstruksi yang diperlukan untuk pembangunan prasarana pertanian telah dihitung. Harga satuan bahan, upah pekerja, pekerjaan konstruksi disiapkan oleh Dinas PU Propinsi.

Keperluan tenaga kerja tiap unit pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi bendung dan jalan dan galian untuk konstruksi tambahan dan sebagainya, dan harga satuan untuk pekerjaan beton, pasangan batu cetakan kayu, dan lain-lain telah ditetapkan dengan metoda build - up yang didasarkan pada keperluan tiap satuan pekerjaan dengan estimasi standar untuk Indonesia. Perkiraan harga satuan untuk pembukaan lahan pertanian telah ditetapkan sesuai dengan standar perkiraan pembangunan lahan di

Jepang. Sehubungan dengan harga alat, sewa alat tidak menjadi penentu untuk proyek-proyek konstruksi yang menggunakan peralatan konstruksi yang disediakan oleh JICA dalam kerangka kerja proyek dan hanya biaya operasi (bahan bakar dan pelumas serta biaya operator) menjadi faktor penentu.

Harga konstruksi yang telah diestimasi (dalam dokumen terpisah) ditunjukkan dalam Tabel 2-13. Nilai tukar yang digunakan adalah US\$ 1,00 = Rp.1.850,- = ¥ 148 ; ¥ 1.00 = Rp.12.5.

Tabel 2 - 13 Harga konstruksi secara kasar

Uraian	Jumlah (¥)	Keterangan
Lahan Pertanian	6,150,000	Pembukaan tanah pertanian
Prasarana Pertanian	113,850,000	Saluran, jalan
Fasilitas Pertanian	29,320,000	Bangunan
Jumlah	149,320,000	

b) Hasil-hasil pendanaan untuk biaya lokal Jepang (JICA)

Sebagian biaya operasi proyek, yang aslinya diadakan oleh pihak Indonesia, dialihkan kepada pihak Jepang, yang memberikan kontribusi pada operasi proyek yang sukses. Jumlah biaya yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- Biaya riset lokal
  - th. 1993 : ¥ 923,000
- Biaya bantuan untuk negara miskin
  - th. 1991 : ¥ 900,000
  - th. 1992 : ¥ 1,154,000
- Pengembangan Teknologi dan biaya promosi
  - th. 1992 : ¥ 320,000
  - th. 1993 : ¥ 650,000
- Biaya untuk Keadaan Darurat
  - Pembuatan fasilitas penyimpanan untuk peralatan
    - th. 1991 : ¥ 457,000
    - th. 1992 : ¥ 1,065,000
  - Perbaikan jembatan kayu (Desa Palanga)
    - th. 1993 : ¥ 1,951,000
- Demonstrasi wilayah dan biaya tambah (biaya seminar lokal)

th. 1992	:	¥ 660,000
th. 1992	:	¥ 1,101,000
th. 1994	:	¥ 1,246,000
th. 1995	:	¥ 1,457,000

- Biaya pelatihan pegawai tingkat menengah

Berbagai macam pelatihan telah dilaksanakan dengan menggunakan daftar biaya yang merupakan jenis aktivitas utama. Jumlah peserta pelatihan hingga tahun 1994 adalah 4.600 orang, dan pelatihan itu diakui sebagai kontribusi utama untuk pendidikan bagi sumberdaya manusia di wilayah proyek. Karena biaya bagi fihak Indonesia muncul, maka bagian biaya untuk fihak Jepang berkurang. Apabila proyek telah selesai, maka fihak Indonesia diharapkan mengembangkan sendiri program pelatihan tersebut.

th. 1991	:	¥ 1,700,000
th. 1992	:	¥ 6,415,000
th. 1993	:	¥ 5,088,000
th. 1994	:	¥ 2,821,000
th. 1995	:	¥ 1,443,000

- Biaya perkembangan prasarana proyek (model pembangunan prasarana)

Berdasar kesadaran bahwa pembangunan prasarana, misal fasilitas irigasi dan jalan, tak dapat dilakukan tanpa pembangunan pedesaan terpadu, proyek ini memerlukan dana setiap tahun selama lima tahun. Lagipula skala pendanaannya diatur sedemikian sehingga tidak melampaui standar pendanaan Departemen Pertanian Indonesia untuk pekerjaan irigasi, dengan maksud untuk mewujudkan pembangunan otonomi oleh Pemerintah Indonesia pada skala yang sama. Proses pelaksanaan untuk pekerjaan ini sekaligus memenuhi fungsi transfer teknologi, yaitu dengan penyediaan pelatihan orang-orang dalam pembangunan prasarana pertanian, pengawasan pembangunan, pengoperasian alat dan lain-lain.

th. 1991	:	¥ 18,265,000
th. 1992	:	¥ 23,504,000
th. 1993	:	¥ 61,228,000
th. 1994	:	¥ 38,165,000
th. 1995	:	¥ 22,398,000

- Biaya lokal umum

Sebagai tambahan dari hal-hal diatas, biaya operasi harian dianggarkan sebagai berikut :

th. 1991	:	¥ 5,306,000
th. 1992	:	¥ 6,562,000
th. 1993	:	¥ 6,030,000
th. 1994	:	¥ 8,853,000
th. 1995	:	¥ 9,498,000

c) Hasil-hasil anggaran biaya lokal Pemerintah Indonesia

▪ Lahan, bangunan dan fasilitas

Lahan, bangunan dan fasilitas dipersiapkan sebagaimana yang direncanakan, tetapi bantuan untuk fasilitas penyimpanan dan untuk peralatan diminta dari Jepang.

▪ Biaya operasi

Anggaran biaya yang layak untuk dana operasi telah dihitung tetapi anggaran untuk biaya perjalanan bagi konterpart dipertimbangkan tidak cukup.

▪ Penugasan konterpart

Penugasan konterpart pada proyek dilakukan sebagaimana dirinci dalam dokumen yang bertalian. Beberapa penugasan terlambat dan dalam beberapa hal konterpart yang ditugaskan tidak mempunyai ilmu dan/atau pengalaman yang cukup pada bidang tugasnya yang akan memberi kontribusi dapat mengganggu proyek pada awalnya. Lagi pula terdapat banyak perubahan dalam penugasan full-time konterpart. Dari sudut pandang teknologi pelaksanaan penuh dan perkembangan otonomi, seseorang yang lebih mantap dalam hal kecakapan pelatihan sangatlah diinginkan.

(5) Proyek Pembangunan Prasarana Percontohan

Berdasar kesadaran bahwa pembangunan suatu prasarana termasuk irigasi dan jalan merupakan hal yang sangat perlu bagi pembangunan terpadu untuk desa-desa perkebunan, maka proyek ini menganggarkan berbagai macam ongkos misal untuk pembangunan setiap tahun selama lima tahun. Selanjutnya sehubungan dengan skala pembangunan instalasi irigasi yang dilakukan oleh Menteri PU Indonesia, maka telah ditetapkan untuk membatasi ukuran proyek agar tidak melebihi tingkat investasi Indonesia, dengan maksud untuk memajukan kemampuan pembangunan mandiri pada skala yang sama bagi Pemerintah Indonesia. Proses pembangunan prasarana proyek menjadikan bagi diri sendiri suatu kesempatan untuk melakukan alih teknologi, memberikan kontribusi terhadap pelatihan orang-orang, terutama dalam pembangunan prasarana pertanian, menyelenggarakan pengawasan pembangunan dan operasi permesinan.

Dengan menetapkan suatu model pembangunan untuk desa-desa pertanian, proyek pembangunan pedesaan dan pertanian ini berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari penduduk setempat pada daerah pembangunan. Untuk mencapai maksud ini, proyek melaksanakan pembangunan lahan (lokasi tanah pertanian, sistim irigasi dan drainasi serta jalan) demikian juga membuat konstruksi fasilitas pertanian (fasilitas penyimpanan benih, fasilitas pelatihan dan fasilitas kelompok).

Berkenaan dengan pembangunan prasarana, telah ditetapkan bahwa petani lokal akan secara aktif terlibat dalam aktifitas kerja sama dalam proyek. Untuk memungkinkan hal tersebut, proyek ini direncanakan sebagai proyek yang bersifat melakukan pendekatan partisipasi di mana para petani muda dari kelompok tani akan melaksanakan kegiatan, pembangunan pada lahan pertanian dan konstruksi sistim irigasi dan drainasi.

Oleh karena itu proyek pendekatan partisipasi ini dilengkapi dengan pembagian tugas-tugas konstruksi menjadi beberapa bagian, beberapa dilakukan melalui kontrak konvensional yang dilakukan oleh perusahaan pembangunan, yang lain dilakukan oleh petani muda dan kelompok tani dengan bimbingan dari Kantor Proyek dan yang lainnya dikerjakan dengan pengelolaan langsung dari Kantor Proyek dengan menggunakan peralatan yang disediakan. Pembagian pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

Situasi model pembangunan prasarana

Desa	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Ranomeeto	o	o			.	.
Palangga		o			.	.
Kiaea			o		.	.
Lalobao			o		.	.
Lapulu			o	o	.	.
Laeya			o	o	.	.
Onewila				o	.	o
Sabulakoa				o		
Biaya Tahunan (1000 ¥)	18,265	23,504	61,288	38,165	22,398	(Anggaran diambil dari Tahun Fiskal yang mendahului)

(6) Pekerjaan pendukung teknis JALDA

Bahan pengajaran audio-visual dan tuntunan alih keteknikan dipersiapkan oleh sistim pendukung teknis JALDA dan disediakan di lokasi proyek. Adapun isinya dapat diuraikan sebagai berikut, sedang rinciannya tercantum dalam lampiran.

a) Persiapan bahan pengajaran audio-visual

Video, slide dan grafik dinding di Indonesia dan/atau Inggris telah digunakan untuk bahan pengajaran sejak tahun 1991, terdiri atas metoda pengolahan padi, kedelai dan jagung, pengelolaan tanah, texture tanah dan lahan pertanian, sebanyak 36 butir.

- b) Persiapan bimbingan alih keteknikan
  - 1) TF 1991 " Perhitungan Stabilitas Bendung Tetap dan Desain Bangunan Terjun" (Indonesia dan Inggris).
  - 2) TF 1992 " Teknik Kreasi Peralatan" (Indonesia).
  - 3) TF 1993 " Standar Desain untuk Jembatan Kayu dan Tumpuan" (Indonesia).
  - 4) TF 1994 Manual untuk "Teknik Kreasi Lahan Pertanian (Planning)" (Indonesia).
  - 5) TF 1995 Manual Teknik " Teknik Pemeliharaan Tanah Pertanian (Pencegahan Kerusakan)" (Indonesia).

## **2.2. Metoda Pelaksanaan Konstruksi**

Dua macam metoda saat ini sedang dipertimbangkan untuk dilaksanakan yaitu kontribusi dengan sistim kontrak konvensional dan konstruksi dengan pengaturan langsung yang dilakukan oleh petani muda dan kelompok tani dibawah pengawasan kantor proyek. Pekerjaan konstruksi akan dibagi dalam dua metoda ini. Metoda pengaturan langsung lebih lanjut dapat dibagi menjadi bagian yang memerlukan pengadaan mesin dan peralatan dan bagian yang mengandalkan tenaga fisik pekerja.

### **(1) Konstruksi yang dikontrakkan**

Bendung pengelak, jembatan dan bangunan-bangunan lain sejenis dan pembuatan tempat penyimpanan biji, pelatihan dan fasilitas-fasilitas lain memerlukan pengetahuan tenaga ahli dan teknik-teknik khusus yang jauh diatas kemampuan kelompok-kelompok tani. Oleh karena itu jenis pekerjaan ini akan dikontrakkan kepada kontraktor bangunan lokal. Dalam hal ini prosedur administrasi untuk pelelangan dan aspek-aspek lain dilakukan sesuai dengan yang biasa diterapkan dalam PU Kantor Proyek akan melakukan desain, perkiraan biaya, pengelolaan konstruksi, pengujian dan pembayaran atas upah konstruksi. Dalam prosesnya pihak proyek akan memberikan seluruh keahlian kepada para konterpart.

### **(2) Konstruksi dengan cara pengaturan-langsung 1 : Pekerjaan-pekerjaan yang menentukan pemakaian mesin (Penyewaan langsung oleh kantor proyek)**

Wilayah sasaran untuk proyek ini adalah daerah yang sama sekali kekurangan akan teknisi pelaksanaan konstruksi yang mampu menggunakan bulldozer, backhoe dan alat-alat berat lainnya untuk membersihkan lapangan dan tanaman padi atau traktor untuk membajak dan mengaduk tanah.

Oleh karena itu beberapa petani muda didaerah tersebut yang diseleksi untuk keperluan proyek akan dilatih sebagai teknisi pelopor dan bertugas untuk memberikan pengalaman praktis di

lapangan untuk memberikan keahlian dasar yang diperlukan untuk operasi, inspeksi, perawatan dan pengelolaan mesin-mesin serta alat-alat yang diperlukan untuk penyiapan lahan pertanian. Mereka juga akan diberi pelatihan metoda pengembangan lahan pertanian melalui konstruksi mekanis. Petani lokal akan dipekerjakan sebagai pekerja fisik untuk pembersihan reruntuhan dari pekerjaan mekanik di lapangan. Cara ini akan digunakan untuk penyiapan lahan pertanian dan pembangunan saluran irigasi.

Upah untuk operator mesin yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi dan upah pekerja secara manual yang menyertai pekerjaan mekanis akan dibayar sesuai dengan catatan waktu kerja. Biaya untuk bahan bakar dan pelumas untuk mesin serta bahan yang diperlukan untuk pekerjaan survei akan dibayar langsung oleh pihak proyek dengan menggunakan slip pembayaran.

**(3) Konstruksi yang diatur langsung 2 : Pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tenaga manual (Menggunakan kelompok tani)**

Terdapat beberapa contoh dalam pelaksanaan proyek ditempat para petani itu sendiri yang melaksanakan pekerjaan pembuatan bendungan dan saluran tanah dengan cara menimbun tanah di sekitar sungai. Ini adalah usaha kelompok yang disebut Swadaya, yang merupakan bantuan kerja oleh kelompok untuk proyek. Pekerjaan tersebut hanya didasarkan atas pengalaman sendiri dari petani tanpa bantuan finansial dan saran teknis. Sehubungan dengan pengalaman yang sederhana ini akan dipekerjakan organisasi petani dalam pembangunan bagi sejumlah saluran, fasilitas pengelolaan air dan bangunan-bangunan sederhana lainnya. Mandor (Supervisor) dengan sejumlah pengalaman dari Swadaya akan diseleksi dan tenaga Swakelola (wage-sharing working parties) akan ditugaskan di sekitar mandor. Kelompok-kelompok petani akan digiatkan untuk berpartisipasi dalam organisasi ini.

Pekerjaan pembangunan yang harus dilakukan sebagian besar adalah pekerjaan tanah yang dilakukan oleh tenaga manusia, tetapi terdapat pula beberapa bangunan pemanfaatan air yang memerlukan campuran beton dan perlu uji kualitas pekerjaan. Pekerjaan ini akan dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan dari Kantor Proyek. Pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pekerjaan saluran irigasi dan bangunan pelengkap serta kelompok fasilitas yang baik.

Sebelum pekerjaan pembangunan dimulai, Mandor yang bertanggung jawab kepada kelompok dan pihak proyek akan membicarakan tentang kebutuhan tenaga kerja tiap m panjang galian saluran dan untuk tiap lokasi bangunan pengambilan dan fasilitas-fasilitas lain, serta jumlah kebutuhan bahan. Pihak proyek kemudian akan memeriksa kemajuan pekerjaan tiap bulan dan membayar upah yang sesuai, serta membuat harga material yang digunakan dalam bulan tersebut. Cara kerja ini akan menggiatkan petani untuk berpartisipasi dengan antusias di proyek dan membangkitkan pengaruh sedikit dalam mendorong organisasi petani.

## *II Isi Perencanaan Proyek*

Hal ini merupakan usaha awal dalam bidang kerja sama teknis untuk menarik partisipasi petani dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun saat ini proposal sedang dalam pertimbangan untuk dikerjakan sesuai rencana, dipastikan bahwa sejumlah permasalahan harus diatasi. Terutama dalam hal konstruksi pengaturan langsung, terdapat permasalahan yang memerlukan pemikiran nyata misalnya seberapa perlu organisasi petani dapat dipekerjakan, bagaimana biaya yang layak untuk konstruksi harus dibayarkan kepada organisasi tersebut, bagaimana permasalahan yang berhubungan dengan kecelakaan dan bencana dalam pelaksanaan pekerjaan dan berapa tingkat keberlangsungan pembangunan dapat diharapkan dengan pekerjaan di tiap desa selesai dalam satu tahun.

**3. *Sistim kerjasama bilateral (organisasi administrasi)***

**3.1. *Departemen Pertanian R.I. dan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara***

**(1) Kedinasan dengan pertanggungjawaban menyeluruh untuk proyek (penandatanganan laporan diskusi)**

Pejabat Menteri Departemen Pertanian.

**(2) Kedinasan dengan pertanggungjawaban untuk pelaksanaan proyek**

Biro Perencanaan, Departemen Pertanian (pusat) (Project Director)

Kantor Daerah di propinsi Sulawesi Tenggara, Departemen Pertanian (proyek) (Project Sub-Director)

**(3) Perwakilan Kerjasama**

Pemda propinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Daerah.

**(4) Kepanitiaan (Rapat gabungan/Rapat Koordinasi)**

**a) Rapat gabungan (dilakukan di pusat)**

Rapat gabungan dilakukan atas kerjasama BAPPENAS dibawah koordinasi Direktur Kantor Perencanaan Departemen Pertanian.

**Fungsi :** Menerima rencana pelaksanaan tahunan berdasarkan Pelaksanaan Jadwal Kasar.

Review rencana tahunan dan progres menyeluruh dan kerjasama.

Pengujian dan pertukaran pandangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam rencana kerjasama teknis.

Pemantauan dan evaluasi aktifitas proyek.

**Frekuensi :** Paling tidak satu kali pertemuan dalam setahun.

**Keanggotaan :** (Fihak Indonesia)

Wakil Biro Perencanaan, Departemen Pertanian.

Wakil Biro Pertanian dan Irigasi, BAPPENAS

Wakil Kerjasama Teknologi Internasional, SECAB.

Petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Perencanaan,  
Departemen Pertanian

(Fihak Jepang)

Ketua Tim

Koordinator

Wakil, Kantor Indonesia, JICA

Anggota Tim Studi JICA.

Catatan) Staf Keduataan Jepang sebagai peninjau

**b) Rapat Koordinasi (Fihak Proyek)**

Rapat Koordinasi dilakukan oleh direktur dari Penda Sulawesi Tenggara, Departemen Pertanian, kerjasama dengan Kantor Perencanaan Pembangunan Sulawesi Tenggara.

Fungsi : Menerima rencana rinci berdasar pada rencana pelaksanaan tahunan.  
Review rencana tahunan dan progres rinci proyek kerjasama.  
Pengujian dan penggantian pandangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam rencana kerjasama teknis  
Melaporkan hal tersebut diatas dalam forum joint meeting

Frekuensi : Sesuai keperluan, paling tidak dua kali pertemuan/tahun

Keanggotaan : (Fihak Indonesia)

Wakil Kantor Perencanaan dan Pembangunan, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Petugas lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Kantor Daerah di Sulawesi Tenggara, Kementerian Pertanian

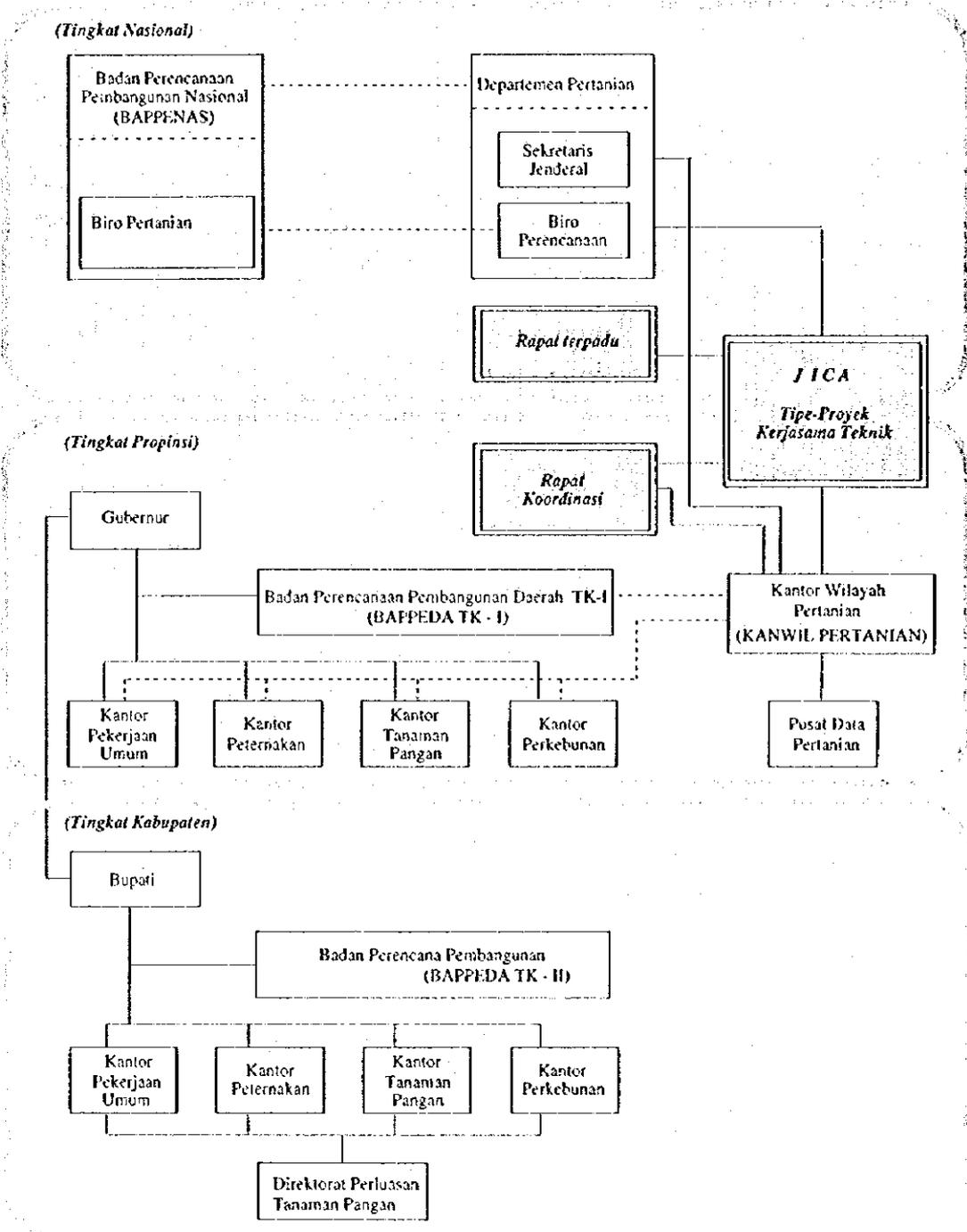
(Fihak Jepang).

Koordinator

Tanaga Ahli

**(5) Bagan organisasi pelaksanaan proyek dan rencana kasar untuk pelaksanaan**

Wakil-wakil organisasi kerjasama proyek tersebut diatas seperti diperlihatkan pada Gambar 2-2 dibawah.



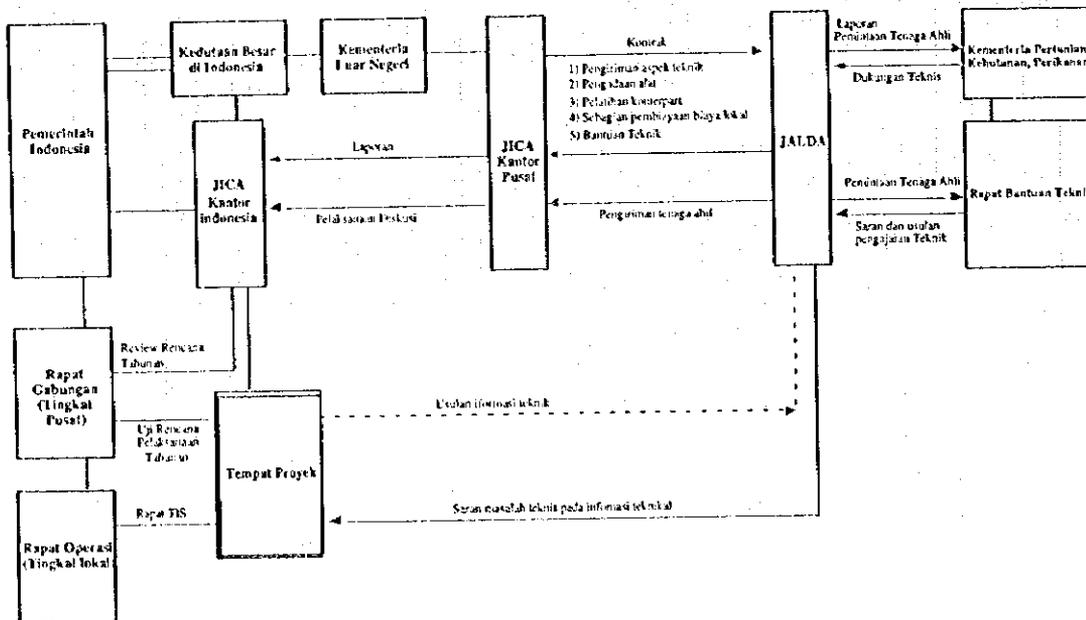
Gambar 2-2 Bagan Organisasi wakil-wakil kerjasama proyek.

(6) Sistem pada fihak Jepang

JICA telah memberi kuasa kepada Japan Agriculture Land Development Agency (JALDA) untuk melaksanakan operasi bantuan berbasis Jepang untuk proyek ini, terutama untuk mempersiapkan

## II Isi Perencanaan Proyek

bantuan dalam aspek Teknis Pekerjaan bantuan teknis termasuk pengiriman tenaga ahli, saran teknis terhadap proyek, perbandingan dan pengiriman data teknis yang relevan dan penyediaan bahan pengajaran audio-visual. Salah satu elemen dari sistim bantuan ini adalah Panitia Pendukung Proyek (Project Support Committee) yang terdiri atas orang-orang terdidik yang faham akan pengalaman di lapangan dalam hal kerjasama teknik. Sistim ini akan membantu proyek melalui kerjasama terpadu dan peningkatan jalur informasi. Strukturnya seperti digambarkan pada Gambar 2-3 dibawah ini.



Gambar 2-3 Sistem di fihak Jepang.